

**PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL,  
ASIMETRI INFORMASI DAN IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE*  
TERHADAP KECENDERONGAN KECURANGAN (*FRAUD*)  
(Studi Kasus pada OPD di Kabupaten Blitar)**

Disusun Oleh:

**INDHIRA AYUSTINA PANGESTUTIE**

**NIM. 145020307111016**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Derajat Sarjana Ekonomi*



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG**

**2018**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, ASIMETRI  
INFORMASI, DAN IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP  
KECENDERUNGAN KECURANGAN**

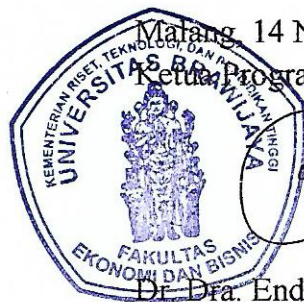
Yang disusun oleh :

Nama : Indhira Ayustina Pangestutie  
NIM : 145020307111016  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 23 Oktober 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

1. Dr. Wuryan Andayani, Ak., CA.  
NIP. 19681029199903 2 001  
(Dosen Pembimbing)
2. Dra. Hj. Wiwik Hidajah Ekowati, M.Si., Ak.  
NIP. 19590204 198601 2 001  
(Dosen Penguji I)
3. Nurlita Novianti, MSA., Ak., CA.  
NIP. 201106871113 2 001  
(Dosen Penguji II)



Malang, 14 November 2018  
Ketua Program Studi S1 Akuntansi,

Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak.  
NIP. 19590902 198601 2 001



**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indhira Ayustina Pangestutie

NIM : 145020307111016

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, ASIMETRI  
INFORMASI DAN IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE  
TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN (FRAUD)**

adalah benar-benar hasil karya Saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi karya orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dengan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 8 Oktober 2014



Indhira Ayustina Pangestutie

Indhira Ayusina Pangestutie  
NIM. 145020307111016

**RIWAYAT HIDUP**

Nama : Indhira Ayustina Pangestutie  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung, 06 Juli 1996  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat Rumah : Jl. Kandung No.4 RT 2/1 Rejotangan, Tulungagung  
Alamat Email : [indiira79@gmail.com](mailto:indiira79@gmail.com)

**Pendidikan Formal**

Taman Kanak-kanak : TK Tunas Harapan Rejotangan (2000-2002)  
Sekolah Dasar : SDN 1 Rejotangan (2002-2008)  
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 2 Blitar (2008-2011)  
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Blitar (2011-2014)  
Perguruan Tinggi : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Brawijaya (2014-2018)

**Pengalaman Organisasi**

1. Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Unit Aktivitas Tenis Lapangan (UATL) Universitas Brawijaya Tahun 2015
2. Staff Hubungan Masyarakat Unit Kegiatan Mahasiswa Unit Aktivitas Tenis Lapangan (UATL) Universitas Brawijaya Tahun 2016
3. Staff Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) Lingkar Studi Mahasiswa Ekonomi (LSME) Universitas Brawijaya tahun 2016-2017

**Pengalaman Kepanitiaan :**

1. Staff Divisi Marketing Brawijaya National Tennis Tournament tahun 2015
2. Staff Divisi Konsumsi LINTAS LSME tahun 2016

**Pengalaman Lainnya :**

1. Staff Magang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar Bidang Anggaran tahun 2017
2. Staff Magang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar Bidang Aset tahun 2017





### Lembar Persembahan

Atas kelancaran perkuliahan hingga sidang, dan sampai dinyatakan lulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Allah SWT yang telah memberikan pertolongan dan memberi petunjuk dan kemudahan atas segalanya.
2. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan moriil dan materiil, serta memberikan semangat sehingga menjadi kekuatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Teman-teman penulis, yaitu Sella, Wuri, Nensi, Rara, Novi, Nira, Elisa, Devi, Nurizza, Naim, Ilena, Noviartha, Addin, Dhita yang selalu memberikan semangat, bantuan dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Teman satu bimbingan yaitu Nuning yang sangat baik dan total dalam membantu segala hal tentang skripsi penulis.

Motto : Life must go on. Let it be awesome!

repository.ub.ac.id

**PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, ASIMETRI  
INFORMASI, DAN IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP  
KECENDERUNGAN KECURANGAN**

Oleh :

**Indhira Ayustina Pangestutie**

**Dosen Pembimbing :**

**Dr. Wuryan Andayani, Ak., CA.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, dan implementasi *good governance*, serta menggunakan variabel dependen yaitu kecenderungan kecurangan. Objek penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Staff Sub Bagian Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Blitar. Data dari penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 76 responden melalui metode *nonprobability sampling*. Data dianalisis menggunakan *Structural Equation Modelling* dengan *Partial Least Square*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal tidak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan, sedangkan implementasi *good governance* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Variabel asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan.

**Kata kunci:** efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, implementasi *good governance*, kecenderungan kecurangan.

**EFFECT OF INTERNAL CONTROL EFFECTIVENESS, ASYMMETRY  
OF INFORMATION, AND IMPLEMENTATION OF GOOD  
GOVERNANCE TOWARD PREFERENCY OF FRAUD**

*Arranged By :*

**Indhira Ayustina Pangestutie**

*Advisor Lecture :*

**Dr. Wuryan Andayani, Ak., CA**

**ABSTRACT**

This study aims to examine the factors that influence tendency of fraud. This study uses three independent variables, which are effectiveness of internal control, information asymmetry, the implementation of good governance, as well as using the dependent variable of tendency of fraud. The object of this study is financial administration employees along with the staff at the Regional Organization (OPD) of Blitar Regency. Data from this study were obtained by distributing questionnaires to 76 respondents. Respondents were determined using the probability sampling method. Data were analyzed using Structural Equation Modeling with Partial Least Square. The test results show that effectiveness of internal control does not have a negative effect on tendency of fraud, and implementation of good governance have a negative effect on the tendency of fraud. Information asymmetry has a positive effect on tendency of fraud

**Keywords: Effectiveness Internal Control, Asymmetry Information, And Implementation Of Good Governance Toward Preferency of Fraud**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDAIAN INTERNAL, ASIMETRI INFORMASI DAN IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN (*FRAUD*)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang wajib ditempuh untuk memenuhi syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian dan penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan pertolongan dan memberi petunjuk dan kemudahan atas segalanya.
2. Ibu Dr. Wuryan Andayani, Ak., CA, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Drs. Roekhudin M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya Malang.

5. Ibu Yeney Widya Prihatiningtias , SE., Ak., MSA.,DBA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
6. Ibu Wiwik Hajati M.Si.,Ak. selaku dosen penguji yang sudah memberikan kritik, masukan dan saran terhadap perbaikan skripsi
7. Ibu Nurlita Novianti SE., MSA., Ak. selaku dosen penguji yang juga sudah memberikan kritik, masukan, dan saran terhadap perbaikan skripsi
8. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat sehingga menjadi kekuatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Teman-teman penulis, yaitu Sella, Wuri, Nensi, Rara, Novi, Nira, Elisa, Devi, Nurizza, Naim, Ilena, Noviartha, Addin, Dhita yang selalu memberikan semangat dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Teman satu bimbingan yaitu Nuning yang sangat baik dan total dalam membantu segala hal tentang skripsi penulis

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Malang, 11 Juni 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teori.....	9
1.4.2 Manfaat Praktik.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
 <b>BAB II TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS</b>	
2.1 Kecenderungan Kecurangan ( <i>Fraud</i> ).....	11
2.1.1 Pengertian Kecurangan ( <i>Fraud</i> ).....	11
2.1.2 Jenis dan Klasifikasi Kecurangan.....	12
2.2 <i>Fraud Triangle Theory</i> .....	14
2.3 Kecurangan di Sektor Pemerintahan.....	16
2.4 Pengendalian Internal.....	18
2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal.....	19
2.4.2 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan.....	20
2.5 Asimetri Informasi.....	22
2.6 <i>Good Governance</i> .....	23
2.6.1 Pengertian <i>Good Governance</i> .....	24
2.6.2 Tujuan <i>Good Governance</i> .....	25
2.6.3 Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> .....	25
2.7 Penelitian Terdahulu.....	26
2.8 Variabel Penelitian dan Pengukurannya.....	28

2.8.1	Variabel Bebas ( <i>Independent Variable</i> ).....	28
2.8.2	Variabel Terikat ( <i>Dependent Variable</i> ).....	32
2.9	Kerangka Pemikiran.....	34
2.10	Pengembangan Hipotesis.....	35
2.10.1	Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan .....	35
2.10.2	Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan .....	36
2.10.3	Pengaruh Implementasi <i>Good Governance</i> terhadap Kecenderungan Kecurangan.....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Jenis Penelitian.....	39
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian.....	39
3.3	Data Penelitian dan Sumbernya.....	41
3.3.1	Jenis dan Sumber Data.....	41
3.3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.4	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	42
3.4.1	Variabel Terikat ( <i>Dependent Variable</i> ).....	43
3.4.2	Variabel Bebas ( <i>Independent Variable</i> ).....	45
3.5	Metode Analisis Data.....	48
3.5.1	Pengujian Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ).....	49
3.5.2	Pengujian Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	51
3.6	Uji Instrumental ( <i>Pilot Test</i> ).....	51

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1	Uji Instrumental ( <i>Pilot Test</i> ).....	53
4.1.1	Hasil Uji Instrumental ( <i>Pilot Test</i> ).....	54
4.2	Hasil Pengumpulan Data.....	57
4.3	Gambaran Karakteristik Responden.....	58
4.4	Statistik Deskriptif.....	60
4.5	Analisis Hasil Penelitian.....	62
4.5.1	Evaluasi Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ).....	62
4.5.1.1	Pengujian Validitas Konvergen.....	62
4.5.1.2	Pengujian Validitas Diskriminan.....	65
4.5.1.3	Pengujian Reliabilitas.....	67
4.5.2	Evaluasi Model Struktural.....	68
4.5.2.1	Nilai <i>R-Square</i> ( $R^2$ ).....	68
4.5.2.2	Nilai <i>Path Coeficient</i> .....	69
4.6	Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	70
4.6.1	Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan.....	70

4.6.2 Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan.....	71
4.6.3 Pengaruh Implementasi <i>Good Governance</i> terhadap Kecenderungan Kecurangan.....	72

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	75
5.3 Saran.....	75





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pengukuran Efektivitas Pengendalian Internal.....	29
Tabel 2.2	Pengukuran Asimetri Informasi.....	30
Tabel 2.3	Pengukuran Implementasi <i>Good Governance</i> .....	32
Tabel 2.4	Pengukuran Kecenderungan Kecurangan.....	33
Tabel 3.1	Sampel Penelitian.....	40
Tabel 3.2	Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS.....	50
Tabel 4.1	Algoritma ( <i>Pilot Test</i> ).....	54
Tabel 4.2	<i>Outer Loading (Pilot Test)</i> .....	55
Tabel 4.3	Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten ( <i>Pilot Test</i> ).....	56
Tabel 4.4	<i>Cross Loading (Pilot Test)</i> .....	56
Tabel 4.5	Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	58
Tabel 4.6	Karakteristik Demografi.....	59
Tabel 4.7	Statistik Deskriptif.....	60
Tabel 4.8	Nilai AVE dan <i>Communality</i> .....	63
Tabel 4.9	Nilai <i>Factor Loading</i> .....	64
Tabel 4.10	Nilai Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten.....	65
Tabel 4.11	Nilai <i>Cross Loading</i> .....	66
Tabel 4.12	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Composite Reliability</i> .....	67
Tabel 4.13	Nilai <i>R-Square</i> .....	69
Tabel 4.14	Nilai <i>Path Coefficient</i> .....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	<i>Fraud Triangle Theory</i> .....	16
Gambar 4.1	Model Pengukuran.....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Penelitian Terdahulu.....	79
Lampiran 2	Kuesioner Penelitian.....	81
Lampiran 3	Jawaban Responden.....	86
Lampiran 4	Hasil Pilot Test.....	88
Lampiran 5	Hasil Output Data PLS.....	90
Lampiran 6	Surat Izin Penelitian.....	93



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kinerja sektor publik seharusnya mampu memenuhi kebutuhan publik dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia, serta didukung dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Namun dalam kenyataannya, organisasi di sektor publik belum mendapat apresiasi yang baik akan prestasinya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dilansir dari Kompas.com Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan bahwa di awal tahun 2017 terdapat 3000 laporan mengenai persoalan pelayanan publik. Salah satu laporan dari masyarakat yaitu masalah pengurusan SIM, hak atas kesehatan dan hak atas pendidikan. Pada sektor pemerintahan, laporan keuangan merupakan alat komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah melalui laporan keuangan dengan membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Pelayanan publik yang kurang memuaskan dipicu oleh berkembangnya praktik kecurangan dalam organisasi sektor publik. Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan atau kelompoknya (Hall, 2009). Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan (*fraud*) merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi sehingga menimbulkan salah saji yang dilakukan secara sengaja dan berdampak pada laporan keuangan suatu entitas (Najahningrum, 2013). Tipologi kecurangan yang sering dilakukan yaitu

berupa korupsi. Tindakan yang sering dilakukan sebagai perilaku korupsi antara lain penghilangan dokumen, manipulasi bukti-bukti berupa dokumen, kesengajaan kesalahan pencatatan maupun *mark-up* yang menyebabkan kerugian bagi perekonomian negara (Adelin, 2013). Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2017, Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara dengan skor 37 (Transparency International, 2017). Selain itu, berdasarkan Annual Report ICW tahun 2017, terdapat 576 kasus korupsi, 1298 tersangka dengan kerugian negara sebesar 6,5 Triliun. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa persepsi tindakan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Kasus korupsi tertinggi di Indonesia terjadi pada sektor pemerintahan. Kasus Setya Novanto merupakan salah satu contoh kasus korupsi tentang KTP-Elektronik dengan kerugian yang besar yaitu mencapai 2,3 Triliun rupiah (ICW, 2017).

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah dengan adanya desentralisasi atau pelimpahan wewenang. Salah satu unsur yang berperan dalam penerapan desentralisasi adalah Perangkat Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016, Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Perangkat Daerah (Perkada). Adapun jenis perangkat Daerah meliputi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Seiring berjalannya waktu, adanya Desentralisasi dari Pemerintah



Pusat ke Pemerintah Daerah menjadi sasaran oleh para oknum untuk melakukan tindakan kecurangan berupa korupsi.

Motivasi seseorang melakukan kecurangan atau *fraud* relatif bermacam-macam. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi seseorang melakukan *fraud* adalah *Fraud Triangle Theory*. *Fraud Triangle Theory* mengemukakan bahwa pada dasarnya kecurangan atau *fraud* terjadi karena adanya tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalitas (*razionalization*). Seseorang akan melakukan tindak kecurangan karena adanya tekanan dalam dirinya baik itu dari segi ekonomi atau kebutuhan lainnya. Adanya peluang juga menyebabkan pelaku kecurangan lebih leluasa dalam melakukan kecurangan. Hal ini dapat disebabkan adanya pengendalian internal yang rendah. Longgarnya pengendalian internal seperti kurangnya pengawasan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku kecurangan untuk menjalankan aksinya. Rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya.

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan dan memicu kecurangan yaitu lemahnya pengendalian internal, tidak adanya kejujuran maupun peraturan kerja yang menyebabkan pelaku kejahatan semakin leluasa dalam menjalankan aksinya (Meilany, 2013). Menurut Priantara (2013) menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat dua faktor yang dapat meningkatkan adanya kesempatan seseorang berbuat kecurangan yaitu sistem pengendalian internal yang lemah dan tata kelola organisasi yang buruk.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputra, Darmawan, dan Purnamawati (2015) mengemukakan bahwa, pengendalian internal kas,

implementasi *Good Governance* dan moralitas individu berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Najahningrum (2013) mengenai persepsi pegawai terhadap kecenderungan kecurangan di sektor publik. Hasil penelitian Najahningrum (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan, sedangkan asimetri berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan.

Pengendalian internal merupakan serangkaian proses yang berkaitan dengan prosedur-prosedur yang harus ditaati dalam kegiatan operasional organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka mengendalikan perilaku anggota organisasi agar proses operasional organisasi berjalan secara efektif dan efisien, dibuatlah peraturan organisasi. Peraturan tersebut harus dipatuhi oleh semua pegawai. Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan dikenai sanksi, dengan tujuan agar di masa mendatang pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi, baik oleh pegawai yang melakukan pelanggaran sebelumnya maupun pegawai yang belum pernah melakukan pelanggaran. Jika dalam organisasi terdapat pengendalian internal yang baik, perilaku menyimpang seperti kecurangan yang mungkin terjadi dalam organisasi dapat diminimalkan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muna (2016) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan

Selain pengendalian internal, faktor lain yang dapat menyebabkan kecenderungan kecurangan adalah asimetri informasi. Asimetri informasi

merupakan situasi dimana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi (Scott, 2014). Pengelola organisasi lebih banyak mengetahui informasi internal dibandingkan dengan pihak pengguna laporan keuangan, sehingga kondisi tersebut dapat membuat pengelola tertentu lebih leluasa atau berkesempatan untuk memanipulasi laporan keuangan yang disajikan dikarenakan ketidaktahuan pengguna eksternal tentang angka dari laporan keuangan yang sebenarnya. Dengan adanya ketidakselarasan tersebut, dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prawira, Herawati, dan Darmawan (2015) bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi asimetri informasi, semakin tinggi pula kecenderungan kecurangan.

Selain efektivitas pengendalian internal dan asimetri informasi, faktor lain yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan yaitu implementasi *Good Governance*. *Good Governance* diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, pegawai serta pemegang saham kepentingan internal dan eksternal lainnya. Kurniawan (2005:16) mengungkapkan tujuan dari diterapkannya *Good Governance* dalam pemerintahan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi *Good*

*Governance* yang efektif, diharapkan mampu mengurangi adanya kecenderungan kecurangan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Saputra, Dharmawan, dan Purnawati (2017) bahwa implementasi *good governance* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan.

Penelitian ini menggabungkan variabel dari dua penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prawira, Herawati, dan Darmawan (2014) dan penelitian yang dilakukan oleh Saputra, Dharmawan, dan Purnawati (2015). Peneliti menggunakan variabel efektivitas pengendalian internal dan asimetri informasi dari penelitian Prawira, Herawati, dan Darmawan (2015), dan menambahkan satu variabel lain dari penelitian Saputra, Dharmawan, dan Purnawati (2017) yaitu implementasi *Good Governance*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel pegawai bagian akuntansi dan keuangan pada BUMD Kabupaten Buleleng (Prawira, Herawati, dan Darmawan, 2014), dan pegawai bagian keuangan pada LPD Kabupaten Buleleng Bagian Timur (Saputra, Dharmawan, dan Purnawati, 2017). Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), kepala sub bagian keuangan, dan staff sub bagian keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Blitar. Pemilihan PPK, kepala sub bagian keuangan, dan staff sub bagian keuangan sebagai sampel penelitian memiliki tiga alasan. Pertama, masih banyaknya kasus kecurangan di sektor publik. Kedua, pemilihan tiga kedudukan struktur organisasi yang berbeda agar menghasilkan sampel yang representatif. Ketiga, PPK, kepala sub bagian

keuangan, dan staff sub bagian keuangan lebih memahami kejadian dalam internal organisasi dan memiliki pengetahuan yang memadai.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) tahun 2016, Kabupaten Blitar menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun adanya predikat tersebut, masih ada kasus-kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Blitar, salah satunya yang dilakukan oleh Tim Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), yaitu ketua, bendahara, dan anggotayang melambungkan (*Mark-up*) dana wisma atlet dengan kerugian negara sebesar Rp. 972.438.000 pada tahun 2017 (<https://nasional.tempo.co>). Hal tersebut dapat mengindikasi kurangnya transparansi dalam membuat laporan keuangan, sehingga mengakibatkan tidak sesuainya informasi yang disampaikan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, dan Implementasi *Good Governance* terhadap Kecenderungan Kecurangan (Studi Kasus pada OPD Kabupaten Blitar)”**.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, dan implementasi *Good Governance* terhadap kecenderungan kecurangan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan?
2. Apakah asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan?
3. Apakah implementasi *Good Governance* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menguji bukti empiris pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan.
2. Menguji bukti empiris pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan.
3. Menguji bukti empiris pengaruh implementasi *Good Governance* terhadap kecenderungan kecurangan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang terkait baik dari sisi pemerintah, masyarakat umum maupun pihak akademisi. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### 1.4.1 Manfaat Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan informasi secara teoritis mengenai pengaruh efektifitas sistem pengendalian, asimetri informasi, dan implementasi *good governance* terhadap kecenderungan kecurangan pada instansi pemerintah.

### 1.4.2 Manfaat Praktik

#### 1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mencegah terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan, dan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

#### 2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi kecurangan yang terjadi pada instansi pemerintah terutama pada OPD di Kabupaten Blitar.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merepresentasikan struktur ataupun susunan yang akan dibahas disetiap babnya. Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima (5) bab, antara lain adalah sebagai berikut :

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **2. BAB II TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini memuat teori yang mendasari penelitian. Penulis memaparkan teori-teori terkait permasalahan yang diangkat untuk dijadikan panduan dalam menganalisis masalah tersebut. Uraian tersebut kemudian digunakan sebagai landasan untuk pengembangan hipotesis.

#### **3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan penulis. Bab ini menjelaskan mengenai rencana dan prosedur penelitian, yang mencakup ruang lingkup penelitian, hubungan variabel penelitian dan definisi operasional, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis.

#### **4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas terkait hasil penelitian dan analisis data, serta pembahasannya sesuai metode penelitian yang digunakan.

#### **5. BAB V PENUTUP**

Bab penutup memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran bagi peneliti, pihak terkait, dan peneliti berikutnya.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)

Pada sub bab ini terdiri dari pengertian kecurangan menurut beberapa ahli dan lembaga, serta menjelaskan jenis dan klasifikasi kecurangan.

##### 2.1.1 Pengertian Kecurangan

Kecurangan (*fraud*) merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) (2014) menjelaskan bahwa kecurangan sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun luar organisasi secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Hal ini termasuk menggelapkan, mencuri, memalsukan, menipu, suap menyuap, dan lain sebagainya. Hall (2009) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai suatu tindakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan atau kelompoknya.

Menurut Suprajadi (2009) dalam Najahningrum (2013), kecurangan (*fraud*) akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan. Jabatan, tanggung jawab, maupun otorisasi memberikan peluang terlaksananya kecurangan.

Ikatan Akuntan Indonesia (2012) mendefinisikan kecurangan sebagai berikut :

(1) salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (2) salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aset (penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aset entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan merupakan tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja demi memperoleh keuntungan keuangan secara ilegal dengan membenarkan atau merasionalkan segala cara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kecenderungan sebagai kecondongan (hati); keinginan (kesukaan); kesudian. Seseorang memiliki kecenderungan kecurangan berarti seseorang tersebut condong atau berkeinginan atau akan berpotensi melakukan kecurangan. Kecenderungan kecurangan dalam lingkup lebih luas dapat diartikan bahwa kecurangan dapat terjadi apabila ada unsur-unsur pendukung yang disengaja ataupun tidak untuk melakukan kecurangan.

### **2.1.2 Jenis dan Klasifikasi Kecurangan (*Fraud*)**

*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) merupakan asosiasi yang memiliki kegiatan utama mencegah dan memberantas kecurangan yang merumuskan kategori kecurangan dalam tiga (3) kelompok yaitu :



### 1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen atau eksekutif di suatu organisasi dengan melakukan rekayasa keuangan yang merugikan investor dan kreditor dengan untuk mendapatkan keuntungan. Kecurangan dapat berupa finansial atau pun non finansial. Kecurangan laporan keuangan dikategorikan menjadi :

- a. *Timing difference*, yaitu mencatat waktu transaksi secara berbeda dari yang sebenarnya.
- b. *Fictitious revenues*, yaitu mencatat pendapatan fiktif.
- c. *Canceled liabilities and expenses*, yaitu menyembunyikan kewajiban perusahaan yang bertujuan agar laporan keuangan terlihat bagus.
- d. *Improper disclosures*, yaitu tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup.
- e. *Improper asset valuation*, yaitu penilaian tidak wajar dengan tujuan untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya.

### 2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset merupakan bentuk kecurangan yang paling mudah untuk dideteksi karena dapat diukur/dihitung. Penyalahgunaan aset dapat digolongkan dalam:

- a. Kecurangan kas, meliputi pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang seperti pemalsuan cek.
- b. Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, meliputi pencurian dan pemakaian persediaan/ aset lainnya untuk kepentingan pribadi.

### 3. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi merupakan jenis kecurangan yang paling sulit dideteksi karena dilakukan oleh beberapa orang yang bekerja sama dalam menikmati keuntungannya. Korupsi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang tertentu sehingga dapat melakukan aksinya dengan baik. Menurut ACFE (2014), korupsi terbagi atas:

- a. Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), sering dijumpai dalam berbagai hal, diantaranya bisnis pejabat (penguasa) dan keluarga serta kroni mereka yang menjadi pemasok atau rekanan di lembaga-lembaga pemerintah dan di dunia bisnis sekalipun.
- b. Suap (*bribery*), merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan memberikan imbalan kepada pihak lain yang bertujuan agar bisa mendapatkan apa yang diinginkan (penyuapan).
- c. Pemberian ilegal (*illegal gratuity*), merupakan bentuk pemberian yang terselubung dari penyuapan.
- d. Pemerasan (*economic extortion*) merupakan kebalikan dari suap. Pegawai meminta pembayaran/ hadiah dari penjual/ vendor untuk suatu keputusan yang akan menguntungkan penjual tersebut.

#### 2.2 *Fraud Triangle Theory*

*Fraud Triangle Theory* merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. *Fraud Triangle Theory* muncul pada tahun 1953 yang diperkenalkan oleh Donald Cressey. *Fraud triangle theory* terdiri dari tiga (3) faktor atau kondisi saat seseorang melakukan kecurangan, yaitu Tekanan

(*Pressure*), Kesempatan (*Opportunity*), dan Pembenaran (*Rationalization*)..

Adapun tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan berdasarkan *Fraud Triangle Theory* dalam (Priantara, 2013) dijelaskan sebagai berikut:

1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan adalah motivasi dari diri seorang pegawai untuk melakukan kecurangan karena adanya dorongan baik dari keuangan maupun non keuangan. Misalnya penggelapan dana bermula dari suatu tekanan kebutuhan keuangan yang mendesak. Tekanan dari dalam diri seseorang tersebut juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat bekerja.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan adalah peluang yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Kesempatan melakukan tindakan kecurangan dapat disebabkan karena lemahnya pengendalian internal suatu organisasi, adanya asimetri informasi, dan penyalahgunaan jabatan wewenang ataupun tanggungjawab.

3. Pembenaran (*Rasionalization*)

Pembenaran atau rasionalisasi adalah proses berfikir dengan pertimbangan moral dari individu pegawai untuk merasionalkan tindakan kecurangan. Rasionalisasi membuat pelaku kecurangan mencari alasan pembenaran atas perbuatannya bahwa tindakan yang dilakukan bukan merupakan bentuk kecurangan. Contoh rasionalisasi yang sering dilakukan oleh pelaku

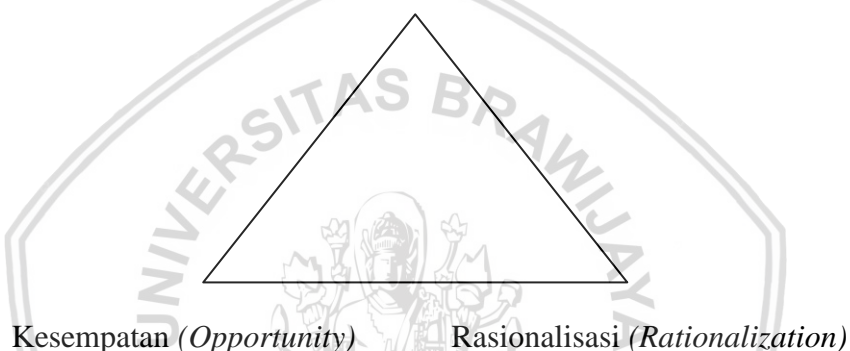
kecurangan yaitu mengatakan “hanya meminjam” atas aset yang telah dicuri dengan berbagai alasan yang rasional.

Ketiga faktor tersebut digambarkan dalam bangun segitiga kecurangan pada gambar 2.1

**Gambar 2.1**

***Fraud Triangle Theory***

Tekanan (*Pressure*)



Sumber: Priantara, 2013

### **2.3 Kecurangan di Sektor Pemerintahan**

Menurut Pristiyanti (2012) semua jenis *fraud* dapat terjadi pada sektor pemerintahan, akan tetapi yang paling sering terjadi adalah korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio-Corruptere* yang artinya busuk, rusak, mengenyahkan, memutarbalik atau menyogok. Secara harfiah korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi ataupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Kecurangan pada sektor pemerintahan semakin luas dilakukan oleh para pelaku kecurangan dalam hal penyalahgunaan wewenang. Hal yang paling sering

dilakukan yaitu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptus* yang artinya berubah dari kondisi adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi ini sangat besar, yaitu dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, dll. Salah satu dampak yang terlihat jelas yaitu meningkatnya kemiskinan di Indonesia.

BPKP (2014) menjelaskan secara rinci tindak kecurangan dari segi penerimaan dan pengeluaran dalam APBN dan APBD. Tindak kecurangan dari segi penerimaan APBN dan APBD dapat berupa :

1. Rendahnya anggaran penerimaan pajak, PBB, bea cukai, retribusi, dan pajak lainnya dibanding potensi yang tersedia.
2. Manipulasi restitusi pajak.
3. Penjualan aset pemerintah tidak berdasar harga wajar atau harga pasar.
4. Penerimaan yang seharusnya masuk ke rekening kas negara, masuk ke rekening atas nama pejabat atau perorangan.

Tindak kecurangan dari segi pengeluaran APBN dan APBD dapat berupa :

1. Pengeluaran belanja/jasa atau perjalanan dinas fiktif.
2. Pembayaran ganda pejabat atau pegawai yang diperbantukan.
3. Penggelembungan (mark-up) harga, atau harga patokan terlalu mahal dibandingkan harga pasar.
4. Pekerjaan atau barang yang dihasilkan tidak sesuai spesifikasi.
5. Program bantuan sosial atau penanggulangan bencana yang salah sasaran.

6. Adanya “percaloan” dalam pengurusan alokasi dana, sehingga instansi daerah yang ingin mendapatkan alokasi anggaran perlu mencadangkan dana untuk komisi.
7. Biaya yang terlalu tinggi pada penunjukkan konsultan keuangan, akuntan, underwater, dan penggunaan tenaga profesional lainnya terkait dengan program pemerintah atau BUMN.
8. Pemenang tender men-sub kontrak-kan pekerjaannya kepada pihak ketiga.

Kecurangan yang terjadi di instansi pemerintah akan mengakibatkan pengelolaan sumberdaya ekonomi yang tidak tepat. Penindakan terhadap kejahatan kecurangan dibagi menjadi tiga golongan yaitu: (1) Tindakan preventif, dengan cara memberi kesejahteraan yang baik untuk pegawai, menjaga kesejahteraan SDM, melakukan pengawasan yang lebih kuat melalui atasan atau rekan sejawat, memperkuat sistem pengendalian internal yang dimiliki, memperkuat internal audit, dan memperkuat kode etik. (2) Tindakan detektif, dengan cara memperbaiki sistem tindak lanjut dari pengaduan, mengawasi gejala-gejala *fraud* sejak dini, lebih mendalami mengenai *fraud* auditing bagi internal audit, dan turut serta dalam gerakan moral. (3) Represif, dengan cara melakukan investigasi terhadap audit (Sukanto, 2007).

#### **2.4 Pengendalian Internal**

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan Instansi Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari sistem pengendalian internal. Untuk memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus menerus terhadap sistem



pengendalian internal. Cara Pimpinan Instansi Pemerintah mengetahui kinerja dan efektifitas sistem pengendalian internal yaitu melalui evaluasi terpisah atas sistem pengendalian internalnya. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah kelola (*mismanagement*).

#### 2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal

Pengawasan internal merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang memiliki fungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, audit, pelaporan dan telaah sejawat.

Berikut beberapa definisi dari Sistem Pengendalian Internal, yaitu :

Sistem Pengendalian Internal menurut COSO (1992) dalam Saputra (2016) menyatakan bahwa:

*“Internal control is process, affected by entity’s board of directors, management an other personal, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting and compliance with applicable law and regulations”*

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa:

“Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melauai kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah, yang kemudian disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

Mulyadi (2008:180) mengemukakan pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasi.

Berdasarkan pengertian dari beberapa sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan serangkaian proses yang berkaitan dengan prosedur-prosedur yang harus ditaati dalam kegiatan operasional organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

#### **2.4.2 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mengemukakan unsur-unsur SPIP adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian

Kelima unsur tersebut diuraikan lebih mendalam sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif

untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi bagi efektifitas penerapan komponen SPIP lainnya. Lingkungan pengendalian terdiri dari:

- a. Penegakkan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait

## 2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan sebagai kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah terlebih dahulu menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## 3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian dimaksudkan sebagai tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah

dilaksanakan secara efektif. Pimpinan instansi wajib menelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat, tugas dan fungsi yang bersangkutan.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif

#### 5. Pemantauan Pengendalian Internal

Proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal melalui :

- a. Pemantauan berkelanjutan
- b. Evaluasi terpisah
- c. Penyelesaian audit

### 2.5 Asimetri Informasi

Laporan keuangan dibuat untuk menyediakan informasi yang berguna dalam menilai kemampuan manajemen untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif sebagai upaya pencapaian tujuan. Namun demi tujuan tertentu yang lain yaitu untuk kepentingan pribadi, terdapat salah satu kendala yang berpotensi muncul sebagai akibat terjadinya ketidakseimbangan informasi antara yang diharapkan oleh pihak *principal* dengan *agent*. Kondisi seperti ini disebut sebagai asimetri informasi.

Menurut Kurniawan (2012) asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana terjadi ketidakseimbangan yang dimiliki oleh agen dan *principal* yang disebabkan karena distribusi informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak. Sedangkan Menurut Scott (2014) asimetri informasi merupakan keadaan dimana pihak internal organisasi mengetahui informasi yang lebih baik dibanding pihak eksternal organisasi (*stakeholder*).

Scott (2014) menyatakan bahwa terdapat dua macam asimetri informasi yaitu :

1. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan perusahaan dibandingkan pihak luar.
2. *Moral hazard*, yaitu jenis asimetri informasi dimana ada pihak yang terkait dengan transaksi perusahaan yang dapat mengamati secara langsung berjalannya transaksi tersebut, sedangkan pihak lain tidak dapat melakukan hal yang sama.

Praktik asimetri informasi dalam organisasi sektor publik dapat terjadi pada praktik penyalahgunaan wewenang dalam membuat dan memanipulasi perencanaan anggaran. Seperti banyak kasus yang ditangani KPK mengenai penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran pembangunan dan korupsi dana pembuatan e-KTP yaitu oleh ketua DPR RI Setya Novanto 2017

## **2.6 Good Governance**

Pada sub bab ini membahas tentang pengertian *good governance* dari beberapa sudut pandang, tujuan *good governance*, serta prinsip-prinsip *good governance*

### 2.6.1 Pengertian *Good Governance*

*Good Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui oleh dunia. *Forum for Corporate Governance In Indonesian* (FCGI) mendefinisikan *Good Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang saham kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Dari sudut pandang *United Nation Development Program* (UNDP), mengungkapkan bahwa tata kelola pemerintahan dikatakan baik apabila sumber daya dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif dan efisien, yang merupakan respon dari kebutuhan masyarakat.

*Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggungjawab, sejalan dengan prinsip demokratis dan efisiensi pasar, penghindaran kesalahan alokasi atas dana investasi, pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmoro, 2009:18).

Menurut Bank Dunia (1992) dalam Rosjidi (2010), *Good Governance* adalah sistem pemerintahan yang handal, pelayanan publik yang efisien, serta pemerintah yang akuntabel terhadap publik.

Berdasarkan beberapa pengertian *Good Governance* menurut para ahli dan lembaga, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* lebih berfokus pada



pertumbuhan sektor publik yang bersinergis untuk mengelola sumber daya yang dimiliki suatu negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari kepentingan diri sendiri atau melakukan penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

### **2.6.2 Tujuan *Good Governance***

*Good Governance* lebih menekankan pada proses, sistem, prosedur, dan peraturan, baik formal maupun informal, yang menata suatu organisasi untuk taat terhadap peraturan tersebut. *Good Governance* lebih diarahkan sebagai panduan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemakaian sumber daya organisasi sejalan dengan tujuan organisasi dan memberikan keuntungan.

Kurniawan (2005:16) mengungkapkan tujuan dari diterapkannya *Good Governance* dalam pemerintahan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

### **2.6.3 Prinsip-Prinsip *Good Governance***

Prinsip-prinsip *Good Governance* menurut Mardiasmo (2009) yaitu terdapat 3 prinsip utama *good governance*, sebagai berikut:

#### **1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap

masyarakat luas dalam suatu organisasi. Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan kepada pemberi amanah atau masyarakat terkait kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintah.

## 2. Transparansi

Transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi menyangkut keterbukaan dalam manajemen pemerintahan, manajemen lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memperoleh informasi.

## 3. Value for Money

Value for money adalah suatu konsep pengelolaan yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu:

- a. Ekonomi, yaitu pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang rendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input yang digunakan.
- b. Efisiensi, yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output.
- c. Efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*) beserta variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian ini:

Najahningrum (2013) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan: persepsi pegawai dinas provinsi DIY. Variabel independen yang digunakan adalah penegakkan peraturan, sistem pengendalian internal, asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi, dan budaya etis organisasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penegakkan peraturan, sistem pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi, dan budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra, Dharmawan, dan Purnawati (2015) membahas mengenai pengaruh pengendalian intern kas, implementasi *Good Governance* dan moral individu terhadap kecenderungan kecurangan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pengendalian intern kas, implementasi *Good Governance*, dan moralitas individu berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Muna (2016) membahas mengenai pengaruh pengendalian internal, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada SPI Fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan, sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan.

## 2.8 Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Pada sub bab ini terbagi menjadi dua bagian yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*) yang akan membahas mengenai pengukuran yang digunakan pada masing-masing variabel penelitian.

### 2.8.1 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, dan implementasi *good governance*.

#### a. Efektivitas Pengendalian Internal ( $X_1$ )

Pengendalian internal merupakan kebijakan atau prosedur yang digunakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan organisasi sehingga dapat mencapai tujuan-tujuannya serta mampu meminimalkan terjadinya kehilangan informasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, terdapat lima unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian. Dengan adanya pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan dapat menciptakan lingkungan pengendalian menjadi kondusif serta efektif. Selanjutnya penilaian risiko dimaksudkan sebagai kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Dalam penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah terlebih dahulu menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan

pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Unsur ketiga yaitu kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian dimaksudkan sebagai tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur keempat yaitu informasi dan komunikasi yang wajib diselenggarakan secara efektif. Unsur kelima yaitu pemantauan pengendalian internal. Proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Berdasarkan uraian di atas, pengendalian internal diukur dengan indikator yang mengacu pada unsur tersebut dengan menggunakan item kuesioner dari Wulandari (2015) dalam Saputra (2016). Tabel 2.1 di bawah ini merangkum terkait pengukuran efektivitas pengendalian internal.

**Tabel 2.1**  
**Pengukuran Efektivitas Pengendalian Internal**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Item</b>
Efektivitas pengendalian internal	serangkaian proses yang berkaitan dengan prosedur - prosedur yang harus ditaati dalam kegiatan operasional organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di instansi tempat saya bekerja, sudah ada pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas</li> <li>2. Di instansi tempat saya bekerja, telah ditetapkan peraturan untuk pemeriksaan fisik atas kekayaan instansi (kas, persediaan, dll)</li> <li>3. Di instansi tempat saya bekerja, seluruh informasi kegiatan operasional instansi harus dicatat sesuai dalam sistem akuntansi</li> <li>4. Di instansi tempat saya bekerja, diterapkan peraturan untuk dilakukannya pemantauan dan evaluasi atas aktivitas operasional untuk menilai pelaksanaan pengendalian internal, (misal derajat keamanan kas, persediaan, dsb)</li> </ol>

Sumber: Wulandari (2015) dalam Saputra (2016)

### b. Asimetri Informasi ( $X_2$ )

Asimetri informasi merupakan keadaan dimana pihak internal organisasi mengetahui informasi yang lebih baik dibanding pihak eksternal organisasi (*stakeholder*) (Scott, 2014). Dalam sektor publik, manajer atau agen diartikan sebagai pihak pemerintah sedangkan yang berperan sebagai pihak eksternal adalah masyarakat dan pihak yang membutuhkan penyediaan informasi lainnya. Adanya publikasi laporan keuangan merupakan perwujudan dari transparansi antara pihak internal terhadap pihak eksternal yang membutuhkan informasi. Sehingga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya asimetri informasi.

Berdasarkan uraian di atas, asimetri informasi diukur dengan indikator yang mengacu pada unsur tersebut dengan menggunakan item kuesioner dari Wilopo (2006) dalam Najahningrum (2013). Tabel 2.1 di bawah ini merangkum terkait pengukuran efektivitas pengendalian internal.

Tabel 2.2 merangkum terkait pengukuran asimetri informasi.

**Tabel 2.2**  
**Pengukuran Asimetri Informasi**

Variabel	Definisi	Item
Asimetri informasi	keadaan dimana pihak internal organisasi mengetahui informasi yang lebih baik dibanding pihak eksternal organisasi ( <i>stakeholder</i> ).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di instansi ini, hanya penanggung jawab penyusunan laporan keuangan yang mengerti lika-liku pembuatan laporan keuangan</li> <li>2. Hanya pihak internal instansi yang mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pembuatan laporan keuangan</li> <li>3. Hanya pihak internal instansi yang mengetahui isi dan angka yang sebenarnya dari laporan keuangan</li> </ol>

Sumber: Wilopo (2006) dalam Najahningrum (2016)



### c. Implementasi *Good Governance* (X<sub>3</sub>)

*Good Governance* seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang saham kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Tiga prinsip *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. Transparansi dalam hal ini informasi yang tersedia dapat dipahami oleh pihak yang membutuhkan informasi. Selain itu, pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) juga dipublikasikan secara bebas. Dalam segala kegiatannya, pemerintah wajib mempertanggungjawabkannya kepada publik yang dilakukan secara periodik. Sedangkan *value for money* merupakan suatu konsep pengelolaan yang didasarkan pada tiga elemen utama (1) ekonomi yang terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input yang digunakan. (2) efisiensi, yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output. (3) efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, diukur dengan indikator yang mengacu pada unsur tersebut dengan menggunakan item kuesioner dari Pangestika (2014). Tabel 2.3 merangkum terkait pengukuran implementasi *Good Governance*.



**Tabel 2.3**  
**Pengukuran Implementasi *Good Governance***

Variabel	Definisi	Item
Implementasi <i>Good Governance</i>	sistem pemerintahan yang handal, pelayanan publik yang efisien, serta pemerintah yang akuntabel terhadap publik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi telah dipublikasikan secara bebas dapat diakses oleh masyarakat luas</li> <li>2. Informasi yang tersedia dapat dimengerti dan merupakan perwujudan nyata dari transparansi pemerintah</li> <li>3. Pertanggungjawaban instansi ini dilakukan secara periodik melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)</li> <li>4. Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas setiap aktivitas akan membangun <i>good governance</i></li> <li>5. Untuk menciptakan <i>good governance</i>, pengelolaan sumber daya publik harus dilakukan secara efektif</li> <li>6. Keuangan dari instansi ini dikelola secara efektif</li> </ol>

Sumber: Pangestika (2014)

### 2.8.2 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (*independent variable*). Variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini yaitu kecenderungan kecurangan.

#### a. Kecenderungan Kecurangan(Y)

ACFE menjelaskan bahwa kecurangan sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun luar organisasi secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. salah satu teori tentang kecurangan yaitu *fraud triangle theory* yang pertama kali dikemukakan oleh Cerssey (1953). Adapun tiga faktor atau

kondisi saat seseorang melakukan kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*).

Tipologi tindak kecurangan yang sering ditemui yaitu korupsi. Macam-macam tindakan korupsi yaitu melakukan *mark-up* pada dana yang dianggarkan, mengadakan kegiatan atau kebutuhan fiktif, adanya anggaran untuk kebutuhan pribadi, membagikan sisa anggaran kepada pegawai lain sebagai bonus, pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang, pengguna anggaran menggunakan kuitansi kosong atas pembelian bahan perlengkapan kantor, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, kecenderungan kecurangan diukur dengan indikator yang mengacu pada unsur tersebut dengan menggunakan item kuesioner dari Tuannakota (2007) dalam Najahningrum (2013). Tabel 2.4 merangkum terkait pengukuran kecenderungan kecurangan.

**Tabel 2.4**  
**Kecenderungan kecurangan**

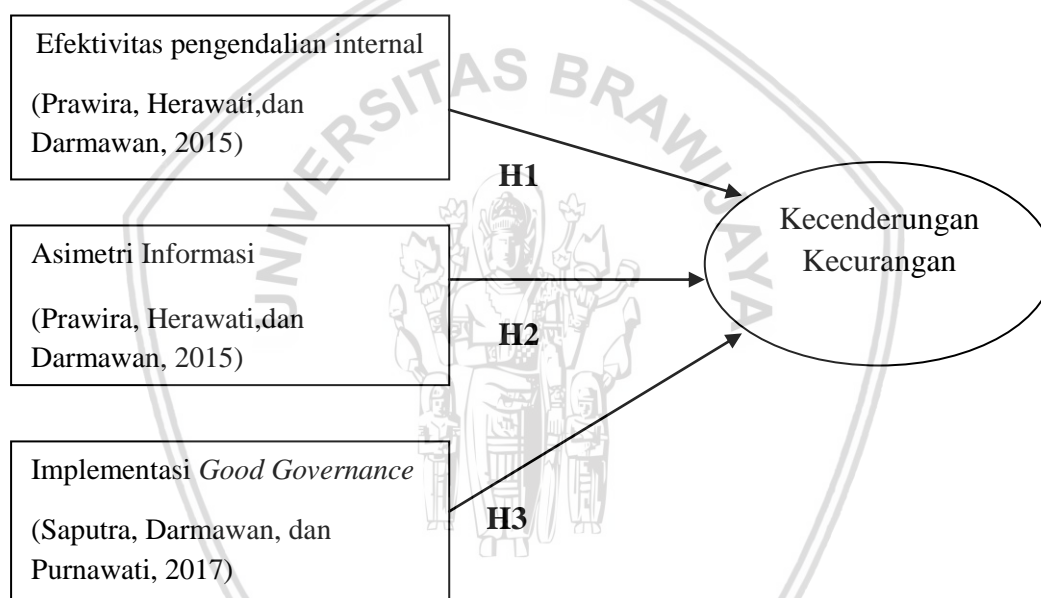
Konstruk	Definisi	Item
Kecenderungan Kecurangan	Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun luar organisasi secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suatu hal yang wajar di instansi saya, apabila untuk suatu tujuan tertentu, biaya dicatat lebih besar dari semestinya</li> <li>2. Merupakan hal yang wajar di instansi saya, apabila pengguna anggaran memasukkan kebutuhan lain yang tidak sesuai ke dalam belanja peralatan gedung dan kantor</li> <li>3. suatu hal yang wajar apabila di instansi saya, ditemukan adanya pengeluaran tanpa dokumen pendukung</li> <li>4. Bukan suatu masalah bagi instansi saya, apabila sisa anggaran dibagikan kepada pegawai sebagai bonus</li> <li>5. Bukan suatu masalah bagi instansi saya, apabila pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otorisasi dari pihak</li> </ol>

		<p>yang berwenang</p> <p>6. Suatu hal yang wajar bagi instansi saya, apabila untuk tujuan tertentu harga beli peralatan/ perlengkapan kantor dicatat lebih tinggi</p> <p>7. Suatu hal yang wajar apabila di instansi saya, para pengguna anggaran menggunakan kuitansi kosong atas pembelian bahan perlengkapan kantor</p>
--	--	--

Sumber: Tuannakota dalam Najahningrum (2013)

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ditunjukkan pada gambar 2.1 sebagai berikut:



Sumber: Data diolah (2018)

Kecurangan adalah tindakan yang melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan *fraud triangle theory* terdapat tiga unsur yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*).

Berdasarkan Priantara (2013:46) salah satu faktor yang dapat meningkatkan adanya peluang atau kesempatan seseorang berbuat kecurangan, yaitu sistem

pengendalian yang lemah, misalnya adanya kepercayaan berlebih yang diterima pelaku kecurangan dari atasan, atau dalam arti atasan tidak disiplin menjalankan pengawasan.

Penelitian ini mencari bukti empiris atas kejelasan tentang pengaruh efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, dan implementasi *good governance* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada OPD Kabupaten Blitar.

## **2.10 Pengembangan Hipotesis**

Setelah mengidentifikasi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dirumuskan hipotesis yang menggambarkan hubungan yang terjadi antar variabel. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing hipotesis, perumusan dari hipotesis pada penelitian ini didasari oleh penelitian terdahulu yang relevan.

### **2.10.1 Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan**

Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi (PP no.60 tahun 2008). Efektivitas sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap tindakan kecurangan. Setiap instansi memiliki sistem pengendalian internal masing-masing yang dibuat berdasarkan kebijakan instansi dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pengendalian internal yang rendah berpotensi menimbulkan kecurangan pada suatu instansi pemerintah. Sistem pengendalian yang efektif

akan mampu mencegah dan mendeteksi terjadinya perilaku yang tidak etis dan praktik-praktik kecurangan.

Semakin baik dan efektif sistem pengendalian internal yang dimiliki, semakin rendah tingkat kecurangan yang terjadi. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Artini (2014). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap potensi kecurangan. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Meliany dan Hernawati (2013) yang meneliti tentang pengaruh keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan yang menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan.

Berdasarkan uraian tentang efektivitas pengendalian internal dan pengaruhnya terhadap kecenderungan kecurangan, dapat dibuat rumusan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan**

#### **2.10.2 Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan**

Menurut Scott (2014) asimetri informasi merupakan keadaan dimana pihak internal organisasi mengetahui informasi yang lebih baik dibanding pihak eksternal organisasi (*stakeholder*). Selain itu adanya perbedaan kepentingan yang dilakukan oleh keduanya dalam mencapai tujuan. Pihak pemberi informasi memiliki lebih banyak informasi dibanding dengan pihak eksternal yang

membutuhkan informasi, sehingga pihak pemberi informasi tidak sepenuhnya mengungkapkan fakta yang sebenarnya demi kepentingan pribadi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Najahningrum (2013) menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat asimetri informasi yang terjadi, semakin meningkat pula kecenderungan kecurangan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prawira, Herawati, dan Darmawan (2014) yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan.

Berdasarkan uraian tentang asimetri informasi dan pengaruhnya terhadap kecenderungan kecurangan, dapat dibuat rumusan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan**

### **2.10.3 Pengaruh Implementasi *Good Governance* terhadap Kecenderungan Kecurangan**

*Good Governance* merupakan sistem pemerintahan yang handal, pelayanan publik yang efisien, serta penyelenggaraan pemerintah yang dicita-citakan oleh setiap negara. Penyelenggaraan *Good Governance* berlandaskan tiga (3) prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, dan value for money (Mardiasmo, 2006)

Implementasi *Good Governance* yang efektif dan efisien pada suatu organisasi, akan meminimalkan terjadinya kecenderungan kecurangan. Sebaliknya



jika implementasi *Good Governance* kurang efektif, maka akan menambah terjadinya kecenderungan kecurangan.

Penelitian Ayu Ratnayani (2014) menyatakan bahwa implementasi *Good Governance* berpengaruh negatif terhadap kecurangan yang berarti bahwa dengan adanya peningkatan *Good Governance* akan menurunkan potensi kecenderungan kecurangan. Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Saputra, Darmawan, dan Purnamawati (2015) yang menyatakan bahwa implementasi *good governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Objek penelitian tersebut yaitu pada LPD Kabupaten Buleleng Bagian Timur.

Penelitian-penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ramadhany (2017) yang menyatakan bahwa implementasi *good governance* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan dengan objek penelitian yaitu Rumah Sakit Swasta di Pekanbaru.

Berdasarkan uraian tentang implementasi *Good Governance* dan pengaruhnya terhadap kecenderungan kecurangan, dapat dibuat rumusan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Implementasi *Good Governance* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *explanatory research*. Menurut Sekaran (2013) *explanatory research* merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan variabel-variabel yang diteliti serta berpengaruh antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Variabel-variabel pada penelitian ini kemudian akan dilakukan pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) dengan tujuan untuk menguji ketiga determinan yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan pada OPD Kabupaten Blitar, yaitu efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, dan implementasi *good governance*.

#### 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik yang peneliti ingin selidiki (Sekaran, 2013). Populasi pada penelitian ini yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), kepala sub bagian keuangan, dan staff sub bagian keuangan pada seluruh OPD Kabupaten Blitar.

Sampel merupakan bagian dari populasi (Sekaran, 2013). Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan suatu penelitian. Terdapat dua jenis desain pengambilan sampel, yaitu pengambilan sampel secara probabilitas dan non probabilitas (Sekaran, 2013). Penelitian ini menggunakan desain pengambilan sampel nonprobabilitas (*nonprobability sampling*) dengan metode *purposive sampling*. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini setiap OPD harus mewakili 1 Pejabat Penatausahaan Keuangan

(PPK), 1 Kepala sub bagian keuangan dan 1 Staff sub bagian keuangan agar sampel bersifat representatif. Tabel 3.1 menunjukkan sampel penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Blitar

**Tabel 3.1**  
**Sampel Penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Dinas Kesehatan	3
2.	Dinas Pendidikan	3
3.	Dinas Sosial	3
4.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3
5.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	3
6.	Dinas Pertanian dan Pangan	3
7.	Dinas Peternakan	3
8.	Dinas kelautan dan Perikanan	3
9.	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata ruang	3
10.	Dinas pekerjaan Umum Bina Marga dan pengairan	3
11.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	3
12.	Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata	3
13.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3
14.	Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika	3
15.	Dinas Pendapatan	3
16.	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil	3
17.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3
18.	Inspektorat	3
19.	Badan Pendapatan Daerah	3
20.	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi	3
21.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3
22.	Badan Perencanaan Pembangunan	3
23.	Sekretaris Dewan	3
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3
25.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3
26.	Dinas Lingkungan Hidup	3
27.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3
28.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3
	Total	84

Sumber: Data diolah, 2018

### **3.3 Data Penelitian dan Sumbernya**

#### **3.3.1 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka, ataupun kalimat yang diberi skor angka sehingga dapat dihitung dan diolah (Sekaran, 2013). Dalam penelitian ini, data kuantitatif diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan telah diberi skor dengan skala yang sudah ditetapkan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sekaran (2013) menyebutkan bahwa data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) yang berkaitan dengan variabel dan tujuan spesifik studi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang diisi oleh responden yang menjadi sampel penelitian yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Staff Sub Bagian Keuangan setiap OPD Kabupaten Blitar.

#### **3.3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data survei untuk memperoleh opini dari responden. Survei merupakan metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Metode survei yang dipilih peneliti yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan suatu daftar pertanyaan yang tertulis yang telah dibuat sebelumnya yang akan dijawab oleh responden. Kuesioner yang disebarkan kepada responden bersifat tertutup. Responden hanya dapat memilih beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. Kuisisioner dalam penelitian ini diberikan secara langsung

kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), kepala sub bagian keuangan, dan staff sub bagian keuangan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Blitar.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan model Skala Likert. Skala Likert merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ke-tidaksetujuan-nya terhadap subyek, obyek, atau kejadian tertentu (Sekaran, 2013). Dalam Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolok ukur dalam menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan ataupun pernyataan. Skala Likert pada penelitian ini menggunakan lima tingkatan beserta poinnya yaitu :

1. Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki poin 1
2. Tidak Setuju (TS) memiliki poin 2
3. Netral (N) memiliki poin 3
4. Setuju (S) memiliki poin 4
5. Sangat Setuju (SS) memiliki poin 5

Metode ini digunakan agar penulis dapat mengetahui dan memiliki data mengenai penilaian yang diberikan oleh setiap pegawai untuk kemudian ditarik kesimpulan.

### **3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Menurut Sekaran (2013), variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Definisi operasional variabel merupakan pandangan mengenai pengertian atau istilah yang digunakan dalam penelitian.

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini kemudian diuraikan menjadi indikator-indikator empiris.

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat (Y) adalah variabel utama yang menjadi faktor utama yang berlaku dalam penelitian, sedangkan variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat (Sekaran, 2013).

#### **3.4.1 Variabel Terikat(*Dependent Variable*)**

Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kecenderungan kecurangan. Kecenderungan kecurangan dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang merugikan pihak lain. Penelitian ini menggunakan pengukuran variabel kecenderungan kecurangan yang mengacu pada konsep *Fraud Diamond Theory*. Indikator kecenderungan kecurangan menggunakan indikator dari Tuannakota (2007) yaitu sebagai berikut:

- 1) Biaya dicatat lebih besar dari semestinya
- 2) Ada anggaran lain diluar kebutuhan
- 3) Pengeluaran tanpa dokumen pendukung
- 4) Sisa anggaran dibagikan sebagai bonus
- 5) Pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otorisasi
- 6) Harga beli perlengkapan kantor dicatat lebih tinggi
- 7) Pengguna anggaran menggunakan kuitansi kosong atas pembelian perlengkapan kantor

Pengukuran variabel kecenderungan kecurangan menggunakan skala likert 5 poin. Skala 1 merepresentasikan “sangat tidak setuju” dan skala 5 merepresentasikan “sangat setuju”. Tipe skala yang digunakan yaitu skala interval. Berdasarkan indikator penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menguraikan pernyataan sebagai berikut :

- 1) Suatu hal yang wajar di instansi saya, apabila untuk suatu tujuan tertentu, biaya dicatat lebih besar dari semestinya
- 2) Merupakan hal yang wajar di instansi saya, apabila pengguna anggaran memasukkan kebutuhan lain yang tidak sesuai ke dalam belanja peralatan gedung dan kantor
- 3) suatu hal yang wajar apabila di instansi saya, ditemukan adanya pengeluaran tanpa dokumen pendukung
- 4) Bukan suatu masalah bagi instansi saya, apabila sisa anggaran dibagikan kepada pegawai sebagai bonus
- 5) Bukan suatu masalah bagi instansi saya, apabila pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang
- 6) Suatu hal yang wajar bagi instansi saya, apabila untuk tujuan tertentu harga beli peralatan/perlengkapan kantor dicatat lebih tinggi
- 7) Suatu hal yang wajar apabila di instansi saya, para pengguna anggaran menggunakan kuitansi kosong atas pembelian bahan perlengkapan kantor

### 3.4.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

#### 1. Efektivitas Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan kebijakan atau prosedur yang digunakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan organisasi sehingga dapat mencapai tujuan-tujuannya serta mampu meminimalkan terjadinya kehilangan informasi.

Dalam penelitian ini, konstruk pengendalian internal diukur menggunakan indikator dari Wulandari (2015) dalam Saputra (2016) yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas
- 2) Peraturan cek fisik atas kekayaan instansi
- 3) Informasi kegiatan operasional dicatat sesuai dalam sistem akuntansi
- 4) Adanya pemantauan dan evaluasi atas aktivitas operasional

Pengukuran variabel efektivitas pengendalian internal menggunakan skala likert 5 poin. Skala 1 merepresentasikan “sangat tidak setuju” dan skala 5 merepresentasikan “sangat setuju”. Tipe skala yang digunakan yaitu skala interval. Berdasarkan indikator penelitian yang telah diuraikan diatas, maka pernyataan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Di instansi tempat saya bekerja, sudah ada pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas
- 2) Di instansi tempat saya bekerja, telah ditetapkan peraturan untuk pemeriksaan fisik atas kekayaan instansi (kas, persediaan, dan lain-lain)
- 3) Di instansi tempat saya bekerja, seluruh informasi kegiatan operasional instansi harus dicatat sesuai dalam sistem akuntansi



- 4) Di instansi tempat saya bekerja, diterapkan peraturan untuk dilakukannya pemantauan dan evaluasi atas aktivitas operasional untuk menilai pelaksanaan pengendalian internal, (misal derajat keamanan kas, persediaan, dsb)

## 2. Asimetri Informasi

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer atau agent memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan kecurangan yang dapat menguntungkan dirinya tanpa sepengetahuan pemilik (principal) (Ariani, 2013). Demi tujuan tertentu yang lain yaitu untuk kepentingan pribadi, terdapat salah satu kendala yang berpotensi muncul sebagai akibat terjadinya ketidakseimbangan informasi antara yang diharapkan oleh pihak *principal* dengan *agent*. Pada penelitian ini, pengukuran konstruk asimetri informasi menggunakan indikator dari Najahningrum (2013) sebagai berikut:

- 1) Pemahaman lika-liku pembuatan laporan keuangan
- 2) Faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan pembuatan laporan keuangan
- 3) Isi dan angka yang sebenarnya dari laporan keuangan

Pengukuran variabel asimetri informasi menggunakan skala likert 5 poin. Skala 1 merepresentasikan “sangat tidak setuju” dan skala 5 merepresentasikan “sangat setuju”. Berdasarkan indikator penelitian yang telah diuraikan diatas, maka pernyataan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Di instansi ini, hanya penanggung jawab penyusun laporan keuangan yang mengerti lika-liku pembuatan laporan keuangan

- 2) Hanya pihak internal instansi yang mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pembuatan laporan keuangan
- 3) Hanya pihak internal instansi yang mengetahui isi dan angka yang sebenarnya dari laporan keuangan

### 3. Implementasi *Good Governance*

*Good governance* merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang saham kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Adapun indikator variabel implementasi *good governance* menganut pada penelitian Pangestika (2016) adalah sebagai berikut:

- 1) LAKIP telah dipublikasi dan dapat diakses oleh masyarakat
- 2) Informasi yang tersedia dapat dimengerti (transparansi)
- 3) Pertanggungjawaban instansi ini dilakukan secara periodik
- 4) Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik akan membangun *good governance*
- 5) pengelolaan sumber daya publik harus dilakukan secara efektif
- 6) Keuangan dari instansi ini dikelola secara efektif

Pengukuran variabel Implementasi *Good Governance* menggunakan skala likert 5 poin. Skala 1 merepresentasikan “sangat tidak setuju” dan skala 5 merepresentasikan “sangat setuju”. Berdasarkan indikator penelitian yang telah diuraikan diatas, maka pernyataan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi telah dipublikasikan secara bebas dapat diakses oleh masyarakat luas
- 2) Informasi yang tersedia dapat dimengerti dan merupakan perwujudan nyata dari transparansi pemerintah
- 3) Pertanggungjawaban instansi ini dilakukan secara periodik melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)
- 4) Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas setiap aktivitas akan membangun *good governance*
- 5) Untuk menciptakan *good governance*, pengelolaan sumber daya publik harus dilakukan secara efektif
- 6) Keuangan dari instansi ini dikelola secara efektif

### 3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Partial Least Square (PLS)*. PLS adalah salah satu metode alternative estimasi model untuk mengelola *Structural Equation Modeling (SEM)* yang berbasis komponen atau varian. PLS adalah sebuah model pendekatan pemodelan kausal yang bertujuan memaksimalkan variansi dari variabel *laten criterion* yang dapat dijelaskan (*explained variance*) oleh variabel *laten predictor*. SEM-PLS dapat bekerja secara efisien dengan ukuran sampel yang kecil dan model yang kompleks. Peneliti menggunakan pendekatan SEM-PLS karena penelitian bersifat eksplanatoris atau perluasan teori yang sudah ada. Pengujian penelitian ini menggunakan alat bantu program SmartPLS ver. 2.0 M3.

Menurut Ghozali (2012), tahapan analisis menggunakan PLS SEM setidaknya harus melalui lima proses tahapan, yaitu :

1. Konseptualisasi Model
2. Metode Analisis Algoritma
3. Menentukan Metode Resampling
4. Menggambar Diagram Jalur
5. Evaluasi model (*outer model* atau *measurement model* serta model *structural* atau *inner model*)

### 3.5.1 Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

Abdillah dan Jogiyanto (2015) menjelaskan bahwa *outer model* merupakan model pengukuran untuk menilai validitas variabel dan reliabilitas instrumen. Suatu model penelitian tidak dapat diuji hubungan relasional dan kausalnya sebelum melewati tahap model pengukuran.

#### 3.5.1.1 Uji Validitas

Uji validitas menjelaskan bahwa pengujian tersebut guna mengetahui kemampuan suatu instrumen penelitian (Abdillah dan Jogiyanto, 2015). Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur suatu item pernyataan yang digunakan dalam instrumen penelitian bersifat valid atau tidak. Validitas terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan.

Validitas konvergen bertujuan untuk mengetahui validitas setiap hubungan antara indikator dengan variabel atau variabel latennya. Validitas konvergen dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara skor item atau *component score* dengan skor variabel laten atau *construct score*

yang diestimasi dengan program PLS. Dalam hal ini variabel konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur variabel harusnya berkorelasi tinggi. Sedangkan validitas diskriminan digunakan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing variabel atau variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Validitas diskriminan memiliki prinsip bahwa pengukur variabel yang berbeda harusnya tidak berkorelasi tinggi.

Berikut adalah parameter instrumen penelitian dalam pengukuran PLS :

**Tabel 3.2**  
**Parameter Uji Validitas dalam Model pengukuran PLS**

Uji Validitas	Parameter	Rule of Thumbs
Konvergen	Faktor Loading	$> 0,7$
	Avarange Variance Extracted (AVE)	$> 0,5$
	Commuality	$> 0,5$
Diskriminan	Akar AVE dan korelasi variabel laten	Akar AVE $>$ Korelasi variabel laten
	Cross Loading	$> 0,7$

Sumber : Abdillah dan Jogiyanto, 2015

### 3.5.1.2 Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep (Abdillah dan Jogiyanto, 2015). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran dilakukan tanpa adanya bias atau bebas dari kesalahan, dan mengukur konsistensi jawaban item pernyataan responden di dalam instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas diukur menggunakan nilai *composite reliability* dan nilai *Cronbach's alpha*. Dalam hal ini instrumen penelitian akan dikatakan *reliable* jika nilai *composite reliability* nya lebih besar dari 0,7 dan jika nilai *Cronbach's alpha* lebih dari 0,6. Jika masing-masing nilai nilai *composite reliability* dan nilai *Cronbach's*

$\alpha$  semakin mendekati angka 1, mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi pula konsistensi *internal reliability*.

### 3.5.2 Pengujian *Inner Model* (Model Struktural)

Pada sub bab pengujian inner model (model sruktural) terbagi menjadi dua bagian yaitu pengujian koefisien determinan ( $R^2$ ) dan uji nilai *path-coefficient*

#### 3.5.2.1 Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

Perubahan nilai  $R^2$  dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen. Semakin tinggi nilai  $R^2$  menunjukkan bahwa semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan (Abdillah & Jogiyanto, 2015).

#### 3.5.2.2 Uji Nilai *Path Coefficient*

Nilai Koefisien Path digunakan untuk menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis (Abdillah & Jogiyanto, 2015). Menurut Hartono (dikutip dalam Abdillah dan Jogiyanto, 2015) menyatakan bahwa ukuran signifikansi kedudukan hipotesis dapat digunakan perbandingan *T-table* dan *T-statistics*, jika nilai *T-statistics* lebih tinggi dari *T-table* maka hipotesis didukung. Untuk tingkat keyakinan 95% ( $\alpha$  5%) maka *T-table* untuk hipotesis dua ekor adalah  $\geq 1,96$ , sedangkan *T-table* untuk hipotesis satu ekor adalah  $\geq 1,64$  (Abdillah dan Jogiyanto, 2015).

### 3.6 Uji Instrumental (*Pilot Test*)

Uji instrumental atau pilot tes dilakukan untuk menguji kelayakan kerangka sampel, dan kelayakan dari setiap pertanyaan pada kuesioner dapat dideteksi kelemahannya sehingga dapat dikoreksi sebelum kuesioner disebar kepada sampel

yang sebenarnya. Menurut Jogiyanto (2016) dalam *pilot test*, sampel dibuat sekitar 10-30 responden. Responden tidak harus merupakan bagian dari populasi targetnya, tetapi dapat berupa individu-individu yang memahami tentang isu yang diteliti. Objek dari pilot test pada penelitian ini yaitu pegawai BPS Kabupaten Blitar yang berjumlah 30 responden.

Sasaran pilot tes terdiri dari dua, pertama untuk meyakinkan bahwa item-item kuesioner telah mencukupi, benar dan dapat dipahami serta untuk mengetahui kevalidan dari item pertanyaan. Kedua, untuk penilaian reliabilitas awal dari skala-skala suatu instrumen. Dalam uji pilot, dilakukan penilaian *outer model* atau *measurement model* untuk memastikan apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian sudah valid dan reliabel. Untuk menilai *outer model* dapat dilakukan dengan melihat *convergent validity*, *composite reliability* dan *discriminant validity*. Menurut Abdillah dan Jogiyanto (2015) indikator dikatakan valid dan reliabel jika nilai AVE dan nilai *communality* > 0,5. Sedangkan nilai *factor loading* harus > 0,7.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Uji Instrumental (*Pilot Test*)

Uji instrumental atau *pilot test* dilakukan untuk menguji kelayakan kerangka sampel, dan kelayakan dari setiap pertanyaan pada kuesioner dapat dideteksi kelemahannya sehingga dapat dikoreksi sebelum kuesioner disebar kepada sampel yang sebenarnya. Menurut Abdillah dan Jogiyanto (2016) dalam *pilot test*, sampel dibuat sekitar 10-30 responden. Responden tidak harus merupakan bagian dari populasi targetnya, tetapi dapat berupa individu-individu yang memahami tentang isu yang diteliti. Objek dari pilot test pada penelitian ini yaitu pegawai BPS Kabupaten Blitar yang berjumlah 30 responden.

Sasaran uji pilot terdiri dari dua, pertama untuk meyakinkan bahwa item-item kuesioner telah mencukupi, benar dan dapat dipahami dan untuk mengetahui kevalidan dari item pertanyaan. Kedua, untuk penilaian reliabilitas awal dari skala-skala suatu instrumen. Dalam uji pilot, dilakukan penilaian *outer model* atau *measurement model* untuk memastikan apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian sudah valid dan reliabel. Untuk menilai *outer model* dapat dilakukan dengan melihat *convergent validity*, *composite reliability* dan *discriminant validity*.

#### 4.1.1 Hasil Uji Instrumental *Pilot Test*

Uji instrumental atau pilot tes dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas item-item kuesioner dalam penelitian. Objek dari pilot test pada penelitian ini yaitu pegawai BPS Kabupaten Blitar yang berjumlah 30 responden. Alasan pemilihan objek pilot tes ini karena BPS merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sehingga tidak termasuk dalam sampel penelitian yang sesungguhnya. Pengujian pilot terdiri dari 3 jenis pengujian yaitu uji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan uji reliabilitas. Hasil pilot tes dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tabel Algoritma (*Pilot Test*)**

Variabel	AVE	Composite Reliability	Cronbachs Alpha	Communality
EPI	0,7004	0,9028	0,8614	0,7004
AI	0,7401	0,8949	0,8253	0,7401
IGG	0,7333	0,9316	0,9266	0,7333
KK	0,6254	0,9207	0,8999	0,6254

Sumber: Data Primer Diolah (2018)

Validitas konvergen mengacu pada nilai *Average Variance Extracted* (AVE), nilai *comunality*, dan nilai faktor loading. Berdasarkan hasil pilot test pada tabel 4.1 (tabel logaritma) menunjukkan bahwa variabel efektivitas pengendalian internal (EPI), Asimetri informasi (AI), Implementasi *Good Governance* (IGG), dan Kecenderungan Kecurangan (KK) memiliki nilai AVE lebih dari 0,5 dan nilai *Communality* juga lebih dari 0,5. Sedangkan nilai faktor *loading/Outer Loading* dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Outer Loadings (*Pilot Test*)**

Variabel	AI	EPI	IGG	KK
AI 1	<b>0,9104</b>	-0,4803	-0,3306	0,5421
AI 2	<b>0,7959</b>	-0,2472	-0,1668	0,3966
AI 3	<b>0,8706</b>	-0,5225	-0,639	0,5554
EPI 1	-0,1543	<b>0,7249</b>	0,4258	-0,1932
EPI 2	-0,5151	<b>0,9177</b>	0,6705	-0,4587
EPI 3	-0,4163	<b>0,8198</b>	0,661	-0,255
EPI 4	-0,4897	<b>0,873</b>	0,4182	-0,273
IGG 1	-0,3295	0,5833	<b>0,7697</b>	-0,3264
IGG 2	-0,4479	0,6611	<b>0,9114</b>	-0,5545
IGG 3	-0,3908	0,6592	<b>0,8907</b>	-0,4422
IGG 4	-0,1106	0,4012	<b>0,7382</b>	-0,3329
IGG 5	-0,4641	0,4245	<b>0,8758</b>	-0,6769
IGG 6	-0,5041	0,7147	<b>0,9334</b>	-0,622
KK 1	0,4296	-0,3661	-0,6571	<b>0,7271</b>
KK 2	0,4331	-0,1757	-0,464	<b>0,7907</b>
KK 3	0,4116	-0,3137	-0,5473	<b>0,9245</b>
KK 4	0,5684	-0,4159	-0,525	<b>0,8141</b>
KK 5	0,4659	-0,3241	-0,5293	<b>0,8061</b>
KK 6	0,46	-0,2509	-0,2666	<b>0,7267</b>
KK 7	0,4924	-0,2237	-0,2235	<b>0,7268</b>

Sumber: Data primer diolah (2018)

Tabel 4.2 (tabel Outer loadings) menunjukkan nilai faktor loading lebih dari 0,7.

Berdasarkan tabel 4.1 (algoritma) dan tabel 4.2 (Outer loading) menunjukkan bahwa uji validitas konvergen telah terpenuhi.

Setelah validitas konvergen terpenuhi, langkah berikutnya peneliti melakukan pengujian validitas dikriminan. Validitas dikriminan dapat diketahui dengan melihat akar AVE dengan Korelasi Variabel Laten, dan juga melihat *cross loading*. Akar AVE harus lebih besar dari Korelasi Variabel Laten, sedangkan *cross loading* harus lebih dari 0,7. Berikut adalah tabel 4.3 yang menunjukkan akar AVE dan Korelasi Variabel Laten.

**Tabel 4.3**  
**Akar AVE dan Korelasi Varibel Laten (Pillot test)**

Variabel	Akar AVE	AI	EPI	IGG	KK	AVE
AI	<b>0,860291</b>	1	0	0	0	0,7401
EPI	<b>0,836899</b>	-0,5017	1	0	0	0,7004
IGG	<b>0,856329</b>	-0,4724	0,6674	1	0	0,7333
KK	<b>0,790569</b>	0,5879	-0,3838	-0,6107	1	0,625

Sumber: Data primer diolah (2018)

**Tabel 4.4**  
**Cross Loading (Pillot test)**

Variabel	AI	EPI	IGG	KK
AI 1	<b>0,9104</b>	-0,4803	-0,3306	0,5421
AI 2	<b>0,7959</b>	-0,2472	-0,1668	0,3966
AI 3	<b>0,8706</b>	-0,5225	-0,639	0,5554
EPI 1	-0,1543	<b>0,7249</b>	0,4258	-0,1932
EPI 2	-0,5151	<b>0,9177</b>	0,6705	-0,4587
EPI 3	-0,4163	<b>0,8198</b>	0,661	-0,255
EPI 4	-0,4897	<b>0,873</b>	0,4182	-0,273
IGG 1	-0,3295	0,5833	<b>0,7697</b>	-0,3264
IGG 2	-0,4479	0,6611	<b>0,9114</b>	-0,5545
IGG 3	-0,3908	0,6592	<b>0,8907</b>	-0,4422
IGG 4	-0,1106	0,4012	<b>0,7382</b>	-0,3329
IGG 5	-0,4641	0,4245	<b>0,8758</b>	-0,6769
IGG 6	-0,5041	0,7147	<b>0,9334</b>	-0,622
KK 1	0,4296	-0,3661	-0,6571	<b>0,7271</b>
KK 2	0,4331	-0,1757	-0,464	<b>0,7907</b>
KK 3	0,4116	-0,3137	-0,5473	<b>0,9245</b>
KK 4	0,5684	-0,4159	-0,525	<b>0,8141</b>
KK 5	0,4659	-0,3241	-0,5293	<b>0,8061</b>
KK 6	0,46	-0,2509	-0,2666	<b>0,7267</b>
KK 7	0,4924	-0,2237	-0,2235	<b>0,7268</b>

Sumber: Data primer diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.3 (Akar AVE dan Korelasi Varibel Laten) nilai Akar AVE dari masing-masing variabel lebih besar daripada nilai korelasi variabel laten. Sedangkan berdasarkan tabel 4.4 (*Cross Loading*) nilai *cross loading* dari

masing-masing variabel lebih dari 0,7. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi.

Setelah instrument penelitian dinyatakan valid, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji reliabilitas. Parameter uji reliabilitas yaitu nilai *Cronbach's Alpha* dan nilai *Composite reliability* > 0,7. Berdasarkan hasil pilot test pada tabel 4.1 (tabel logaritma) diketahui bahwa variabel Efektivitas pengendalian internal (EPI), Asimetri informasi (AI), Implementasi *Good Governance* (IGG), dan Kecenderungan Kecurangan (KK) memiliki nilai *composite reliability* > 0,7 dan nilai *cronbach alpha* juga lebih dari 0,7. Hasil pilot test diatas memperlihatkan bahwa uji reliabilitas telah terpenuhi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dinyatakan valid dan reliabel.

#### 4.2 Hasil Pengumpulan Data

Responden dalam penelitian ini adalah PPK, kepala sub bagian keuangan, dan staff sub bagian keuangan pada OPD yang ada di Kabupaten Blitar. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode survei dengan menyebar kuesioner pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Blitar.

Peneliti melakukan pengumpulan data kurang lebih dua minggu hingga terkumpulnya data. Waktu pengumpulan data dilakukan pada tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 26 Agustus 2018. Sebelum menyebar kuesioner, peneliti meminta surat ijin penelitian dari Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Blitar dan mengirimkan surat ijin tersebut kepada seluruh OPD di Kabupaten Blitar.

**Tabel 4.5**  
**Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Jumlah kuesioner yang disebar	84
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	8
Kuesioner yang kembali	76
Kuesioner yang digugurkan	0
Kuesioner yang digunakan	76
Tingkat pengembalian	86,3%
Tingkat pengembalian yang digunakan	86,3%

Sumber : Data diolah (2018)

Jumlah kuesioner yang disebarkan yaitu sebanyak 84 kuesioner sesuai dengan sampel yang telah ditentukan. Jumlah kuesioner yang kembali yaitu sebanyak 76 kuesioner. 8 kuesioner tidak kembali dikarenakan beberapa alasan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa *response rate* atau tingkat pengembalian dalam penelitian ini sebesar 86,3%, dan *usable response rate* atau tingkat pengembalian yang dapat digunakan juga sebesar 86,3%.

#### 4.3 Gambaran Karakteristik Responden

Berdasarkan data yang diperoleh dalam kuesioner penelitian, dapat diperoleh gambaran karakteristik responden berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria responden pada penelitian ini terdiri dari komposisi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan masa kerja. Tabel 4.6 akan mengemukakan gambaran umum responden berdasarkan beberapa kategori.



**Tabel 4.6**  
**Karakteristik Demografi**

Variabel Demografi	Jumlah	%
Jenis Kelamin :		
Laki-laki	41	53,9%
Perempuan	35	46,1%
Usia :		
< 25 tahun	5	6,7%
26-35 tahun	24	31,5%
36-45 tahun	28	36,8%
>45 tahun	19	25%
Pendidikan terakhir:		
SMA	7	9,2%
D3	9	11,8%
S1	38	50%
S2	12	15,7%
S3	10	13%
Masa Kerja		
1-5 tahun	9	11,8%
6-10 tahun	17	22,4%
11-15 tahun	28	36,8%
>15 tahun	22	28,9%

Sumber: Data primer diolah (2018)

Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin seperti yang dikemukakan pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak yaitu 41 responden (53,9%). Sedangkan sisanya responden perempuan yaitu 35 responden (46,1%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki.

Komposisi responden berdasarkan usia seperti dikemukakan pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa responden terdiri dari 5 responden (6,7%) berusia di bawah 25 tahun, 24 responden (31,5%) berusia 26-35 tahun, 28 responden (36,8%) berusia 36-45 tahun, dan 19 responden (25%) berusia >45 tahun.



Komposisi responden berdasarkan tingkat pendidikan seperti yang dikemukakan pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa 7 responden (9,2%) berjenjang pendidikan SMA, 9 responden (11,8%) berjenjang pendidikan Diploma, 38 responden (50%) berjenjang pendidikan Sarjana (S1), 12 responden (15,7%) berjenjang pendidikan S2, dan 10 responden (13%) berjenjang pendidikan S3.

Komposisi responden berdasarkan masa kerja seperti yang dikemukakan pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa 9 responden (11,8%) bekerja selama 1-5 tahun, 17 responden (22,4%) bekerja selama 6-10 tahun, 28 responden (36,8%) bekerja selama 11-15 tahun, dan 22 responden (28,9%) bekerja selama >15 tahun.

#### 4.4 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadikan informasi lebih jelas dan mudah untuk dipahami (Ghozali Imam, 2011). Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing variabel yang digunakan. Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Microsoft Excel* 2007. Hasil statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel 4.7 berikut :

**Tabel 4.7**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Min	Max	Mean	Stdv.
Efektivitas Pengendalian Internal	76	3	5	4,33	0,591
Asimetri Informasi	76	1	3	1,46	0,625
Implementasi <i>Good Governance</i>	76	3	5	4,37	0,601
Kecenderungan Kecurangan	76	1	3	1,29	0,468

Sumber: Data primer diolah (2018)

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa responden (N) dalam penelitian ini adalah sebanyak 76 orang. Nilai minimum menunjukkan nilai terendah untuk setiap variabel, sedangkan nilai maksimum menunjukkan nilai tertinggi setiap variabel dalam penelitian. Dalam penelitian ini, nilai minimum untuk variabel efektivitas pengendalian internal adalah 3, nilai minimum untuk variabel asimetri informasi adalah 1, nilai minimum untuk variabel implementasi *good governance* adalah 3, dan nilai minimum untuk variabel kecenderungan kecurangan adalah 1. Nilai maksimum untuk variabel efektivitas pengendalian internal dan variabel implementasi *good governance* adalah 5. Sedangkan nilai maksimum dari variabel asimetri informasi dan variabel kecenderungan kecurangan adalah 3.

Nilai mean pada tabel 4.7 menunjukkan nilai rata-rata untuk setiap variabel. Variabel efektivitas pengendalian internal memiliki nilai mean sebesar 4,33 (lebih besar dari 4) hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden adalah setuju. Variabel asimetri informasi memiliki nilai mean sebesar 1,46 (lebih besar dari 1) hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden tidak setuju mengenai asimetri informasi. Variabel implementasi *good governance* memiliki nilai mean sebesar 4,37 (lebih besar dari 4) hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden setuju. Variabel kecenderungan kecurangan memiliki nilai mean 1,29 (lebih dari 1) hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden tidak setuju.

Standar deviasi menunjukkan ukuran penyimpangan. Jika nilai standar deviasi melebihi nilai mean maka terdapat *outlier* pada variabel tersebut. Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa tidak ada nilai standar

deviasi yang melebihi nilai mean, hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada *outlier* pada setiap variabel.

#### 4.5 Analisis Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yaitu efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, implementasi *good governance*, dan kecenderungan kecurangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS) yang dilakukan melalui dua pengujian yakni uji *outer model*(model pengukuran) dan uji *inner model*(model struktural).

##### 4.5.1 Uji Outer Model

Uji *outer model* dilakukan untuk menilai validitas variabel dan reliabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian (Abdilah dan Jogiyanto, 2015). Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisa data dengan *SmartPLS* untuk menilai *outer model* yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*. Dalam penelitian ini analisis *outer model* dilakukan menggunakan aplikasi *SmartPLS* 2.0.M3 dengan hasil *output overview algoritma* yang berupa *quality criteria overview* dan *factor loading (outer loading)*.

##### 4.5.1.1 Pengujian Validitas Konvergen

Pengujian validitas konvergen pada penelitian ini, penulis melakukan dua analisis dengan melihat nilai *Average Variance Extracted*(AVE) dan *Communality* untuk mengetahui nilai rata-rata varian yang diekstraksi dan menganalisis nilai *factor loading* untuk mengetahui nilai masing-masing indikator yang dimiliki oleh variabel laten. Parameter yang digunakan dalam pengujian

validitas konvergen penelitian ini adalah nilai AVE dan *Communality* lebih dari 0,5 dan nilai *factor loading* adalah lebih dari 0,7. Berikut adalah hasil nilai AVE dan *Communality* dari pengolahan data yang telah dilakukan :

**Tabel 4.8**  
**Nilai AVE dan Communality**

<b>Variabel</b>	<b>AVE</b>	<b>Communality</b>
EPI	0,6781	0,6781
AI	0,6767	0,6767
IGG	0,7235	0,7235
KK	0,6480	0,6480

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Keterangan: EPI (Efektivitas Pengendalian Internal), AI (Asimetri Informasi), IGG (Implementasi *Good Governance*), KK (Kecenderungan Kecurangan)

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai AVE dan *Communality* pada masing- masing variabel menunjukkan hasil lebih dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa nilai AVE dan *Communality* telah memenuhi *convergent validity*. Kemudian untuk melihat validitas konvergen selanjutnya dapat dilakukan dengan melihat nilai *factor loading*. Nilai *factor loading* ditunjukkan pada tabel 4.9 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Nilai Factor Loading**

<b>Variabel ke Indikator</b>	<b>Factor Loading</b>	<b>t-statistic</b>
EPI1 <- EPI	0,7484	13,0533
EPI2 <- EPI	0,9045	24,7394
EPI3 <- EPI	0,7779	8,0181
EPI4 <- EPI	0,8538	15,4658
AI1 <- AI	0,8510	15,3176
AI2 <- AI	0,7354	7,2962
AI3 <- AI	0,8747	25,0253
IGG1 <- IGG	0,8270	21,7656
IGG2 <- IGG	0,9032	30,2105
IGG3 <- IGG	0,8560	20,7318
IGG4 <- IGG	0,7368	11,9520
IGG5 <- IGG	0,8726	27,8720
IGG6 <- IGG	0,8969	33,2976
KK1 <- KK	0,7985	17,9924
KK2 <- KK	0,8056	18,3442
KK3 <- KK	0,9168	52,7213
KK4 <- KK	0,7746	15,6394
KK5 <- KK	0,8262	24,0207
KK6 <- KK	0,7414	11,8834
KK7 <- KK	0,7594	12,3058

Sumber: Data Primer Diolah(2018)

**Keterangan:** EPI (Efektivitas Pengendalian Internal), AI (Asimetri Informasi), IGG (Implementasi *Good Governance*), KK (Kecenderungan Kecurangan)

Selain melihat nilai AVE dan Communality, pengujian validitas konvergen juga dapat dilakukan dengan melihat nilai *factor loading*. Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa indikator pada masing-masing variabel memiliki nilai *factor loading* lebih dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa indikator variabel memiliki tingkat validitas yang tinggi dan memenuhi *convergent validity*.

#### 4.5.1.2 Pengujian Validitas Diskriminan

Menurut Abdilah dan Jogiyanto (2015) validitas diskriminan terjadi jika dua instrument yang berbeda yang mengukur dua variabel yang diprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor yang memang tidak berkorelasi. Penilaian validitas diskriminan didasarkan pada nilai *cross loading* yang lebih dari 0,7 dalam satu variabel atau variabel. Selain itu, pengujian validitas diskriminan didasarkan pada nilai akar AVE lebih dari korelasi variabel laten. Berikut adalah hasil nilai akar AVE dari pengolahan data yang telah dilakukan :

**Tabel 4.10**  
**Nilai Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten**

Indikator	Akar AVE	EPI	AI	IGG	KK	AVE
<b>EPI</b>	0,82347	<b>1</b>	0	0	0	0,6781
<b>AI</b>	0,82261	-0,3624	<b>1</b>	0	0	0,6767
<b>IGG</b>	0,85058	0,4772	-0,4164	<b>1</b>	0	0,7235
<b>KK</b>	0,80498	-0,3662	0,5082	-0,6011	<b>1</b>	0,6480

Sumber: Data Primer Diolah (2018)

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai akar kuadrat AVE untuk masing-masing variabel lebih besar daripada nilai korelasinya sehingga variabel dalam model penelitian ini dapat dikatakan memiliki validitas diskriminan yang baik. Selain itu uji validitas konvergen juga dapat dilakukan dengan cara melihat nilai *cross loading*.

Tabel 4.11 menunjukkan nilai cross loading pada masing-masing variabel, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Nilai Cross Loading**

Indikator	AI	EPI	IGG	KK
AI 1	0,8510	-0,3737	-0,2774	0,3966
AI 2	0,7354	-0,1752	-0,1413	0,2864
AI 3	0,8747	-0,3176	-0,5137	0,52
EPI 1	-0,1732	0,7484	0,2621	-0,2899
EPI 2	-0,3519	0,9045	0,4707	-0,3712
EPI 3	-0,2621	0,7779	0,5	-0,1517
EPI 4	-0,3808	0,8538	0,3868	-0,315
IGG 1	-0,3889	0,4694	0,8270	-0,3889
IGG 2	-0,329	0,4632	0,9032	-0,5229
IGG 3	-0,3388	0,4854	0,8560	-0,4269
IGG 4	-0,1334	0,2029	0,7368	-0,2866
IGG 5	-0,3888	0,3028	0,8726	-0,6529
IGG 6	-0,4504	0,4893	0,8969	-0,6212
KK 1	0,4321	-0,2967	-0,6137	0,7985
KK 2	0,4439	-0,2219	-0,4405	0,8056
KK 3	0,4376	-0,2764	-0,5251	0,9168
KK 4	0,4101	-0,4183	-0,4972	0,7746
KK 5	0,4122	-0,2426	-0,5551	0,8262
KK 6	0,3525	-0,2647	-0,3603	0,7414
KK 7	0,3529	-0,3633	-0,2926	0,7594

Sumber : Data Primer Diolah (2018)

**Keterangan:** EPI (Efektivitas Pengendalian Internal), AI (Asimetri Informasi), IGG (Implementasi *Good Governance*), KK (Kecenderungan Kecurangan)

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai *cross loading* masing-masing variabel menunjukkan nilai lebih dari 0,7. Dengan demikian, berdasarkan tabel 4.10 dan tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi uji validitas diskriminan (*discriminant validity*).



#### 4.5.1.3 Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang (responden) terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil. Untuk melakukan pengujian reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua cara yaitu dengan melihat nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability*, pada penelitian ini penulis menggunakan parameter nilai *cronbach's alpha* adalah lebih dari 0,7 dan nilai *composite reliability* adalah lebih dari 0,7. Berikut adalah hasil nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* dari pengolahan data yang telah dilakukan :

**Tabel 4.12**  
**Nilai Cronbach's Alpha**

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
EPI	0,8443	0,8934
AI	0,7682	0,8620
IGG	0,9243	0,9399
KK	0,9094	0,9277

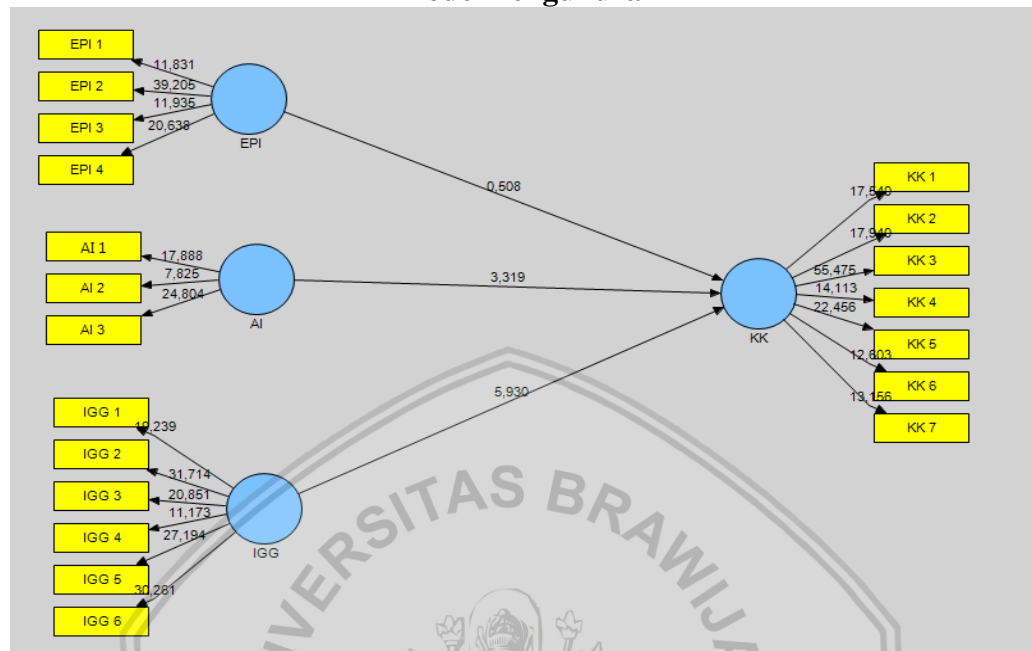
Sumber : Data Primer Diolah, 2018

**Keterangan:** EPI (Efektivitas Pengendalian Internal), AI (Asimetri Informasi), IGG (Implementasi Good Governance), KK (Kecenderungan Kecurangan)

Berdasarkan Tabel 4.12 diatas, dapat diketahui bahwa model menunjukkan nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha* untuk semua variabel berada diatas nilai 0,70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki reliabilitas yang baik sesuai dengan batas nilai minumun yang disyaratkan.

Hasil pengujian validitas konvergen, validitas diskriminan dan reliabilitas, dapat disimpulkan dengan gambar Model Algoritma (Gambar 4.1) berikut ini.

**Gambar 4.1**  
**Model Pengukuran**



Sumber : Data primer diolah (2018)

#### 4.5.2 Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Evaluasi model struktural (inner model) merupakan kelanjutan dari evaluasi outer model (model pengukuran) yang telah diuji sebelumnya. Model struktural dievaluasi menggunakan nilai  $R^2$  dan nilai koefisien path untuk uji signifikansi variabel dalam model struktural.

##### 4.5.2.1 Nilai R-Square $R^2$

Nilai R-square ( $R^2$ ) untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai  $R^2$  berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan (Abdillah & Jogiyanto, 2015).

Nilai  $R^2$  pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.13**  
**Nilai R-square**

Variabel	$R^2$
EPI	
AI	
IGG	
KK	<b>0,4429</b>

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa  $R^2$  untuk variabel kecenderungan kecurangan adalah sebesar 0,4429. Hal ini berarti variabel kecenderungan kecurangan dipengaruhi oleh variabel efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, dan implementasi good governance sebesar 44,29% dan sisanya 55,71% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diajukan dalam penelitian ini.

#### **4.5.2.2 Nilai *Path Coefficient***

Dalam melakukan uji signifikansi pengaruh dapat dilakukan dengan melihat nilai *path coefficient* yang mengukur tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Apabila nilai *path coefficient* yang ditunjukkan nilai *t-statistic*  $>1,64$  maka hipotesis penelitian ( $H_a$ ) diterima. Apabila nilai *t-statistic*  $<1,64$  maka hipotesis ( $H_a$ ) ditolak.

Nilai *path coefficient* pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.14 sebagai berikut :

**Tabel 4.14**  
**Nilai Path Coefficient**

Hipotesis	Variabel	Original Sampel	t-Statistic	Keputusan
H1	EPI -> KK	-0,0381	0,4694	Ditolak
H2	AI -> KK	0,3044	3,0497	Diterima
H3	IGG-> P	-0,4562	5,2990	Diterima

Sumber : Data Primer Diolah (2018)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.14 Nilai *Path Coefficient* di atas, dapat dilihat nilai *T-statistic* pada masing-masing variabel untuk menentukan didukung atau tidaknya hipotesis peneliti. Pengujian pengaruh variabel efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan menunjukkan nilai kurang dari 1,64. Sedangkan variabel asimetri informasi dan implementasi *good governance* menunjukkan lebih dari 1,64.

#### **4.6 Pembahasan hasil Pengujian Hipotesis**

Pada sub bab ini akan membahas hasil pengujian yang telah dilakukan serta analisis dari hasil pengujian tersebut. Adapun pengujian dilakukan terhadap tiga hipotesis yang diajukan dengan tiga variabel bebas yaitu efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, dan implementasi *good governance*, serta menggunakan satu variabel terikat yaitu kecenderungan kecurangan.

##### **4.6.1 Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan**

Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan

kecurangan (Y). Berdasarkan hasil analisis data menggunakan *SmartPLS 2.0 M3*, dapat dilihat dari tabel 4.10 bahwa nilai *t-statistic* pada hubungan efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan adalah 0,4694. Nilai ini menunjukkan *t-statistic* kurang dari 1,64. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal tidak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis 1 atau dengan kata lain hipotesis ditolak.

Hal ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prawira, Herawati, dan Darmawan (2014) bahwa hasil penelitian yang dilakukan pada BUMD Kabupaten Buleleng tersebut menunjukkan efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan objek atau sampel yang berbeda, dapat menghasilkan output yang berbeda dikarenakan keadaan setiap lingkungan instansi yang berbeda-beda.

Justifikasi peneliti juga melihat kurangnya unsur-unsur yang terdapat pada indikator efektivitas pengendalian internal. Oleh karena itu output yang dihasilkan tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

#### **4.6.2 Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan**

Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (Y). Artinya, semakin tinggi asimetri informasi, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam instansi tersebut. Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa nilai *t-statistic* pada hubungan asimetri informasi terhadap kecenderungan

kecurangan adalah 3,0497. Nilai ini menunjukkan t-statistic lebih dari 1,64. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis diterima. Kesimpulan pengujian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi asimetri informasi akan semakin tinggi pula tingkat kecenderungan kecurangan.

Hasil pengujian hipotesis ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Najahningrum (2013) yang menyatakan bahwa variabel asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

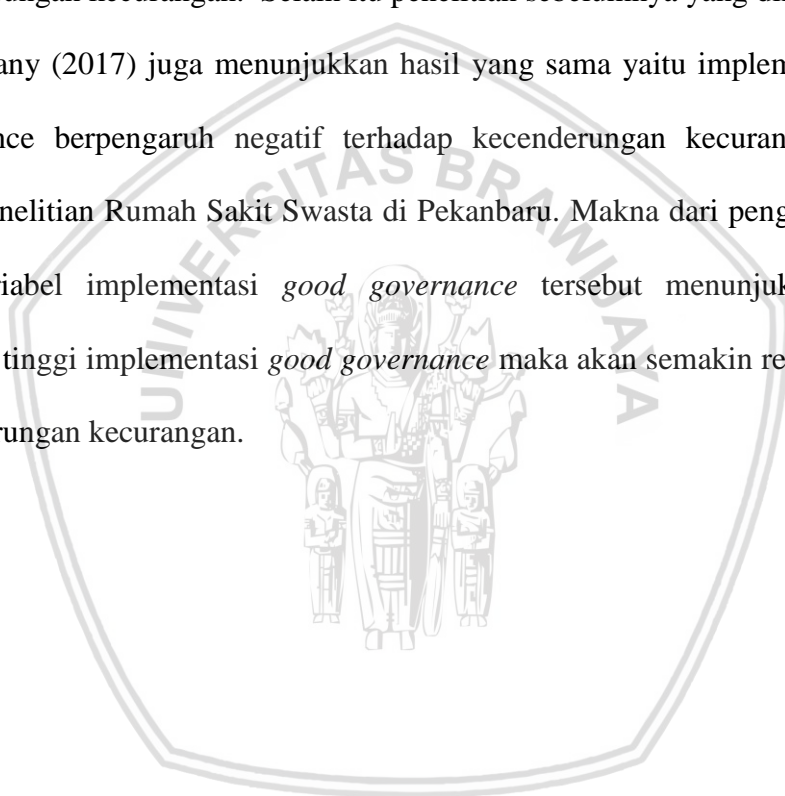
Pengelola laporan keuangan lebih mengetahui laporan keuangan yang sebenarnya dikarenakan pengelola keuangan terlibat langsung dengan kegiatan organisasi, sementara pihak eksternal organisasi memiliki informasi yang lebih sedikit dibandingkan pengelola. Karena kondisi tersebut, pengelola akan lebih leluasa atau berkesempatan untuk memanipulasi laporan keuangan yang disajikan dikarenakan ketidaktahuan pengguna eksternal tentang angka dari laporan keuangan yang sebenarnya. Namun jika dalam suatu organisasi diberlakukan transparansi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan operasional organisasi dan berpengaruh terhadap laporan keuangan, hal tersebut tidak akan terjadi.

#### **4.6.3 Pengaruh Implementasi *Good Governance* terhadap Kecenderungan Kecurangan**

Hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel implementasi *good governance* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (Y). Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa nilai t-statistic pada hubungan implementasi *good governance* terhadap kecenderungan kecurangan

adalah 5,2990. Nilai ini menunjukkan t-statistic lebih dari 1,64. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 3 diterima.

Hasil pengujian hipotesis ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saputra, Dharmawan, dan Purnawati (2017) yang menyatakan bahwa implementasi *good governance* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Selain itu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhany (2017) juga menunjukkan hasil yang sama yaitu implementasi *good governance* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan dengan objek penelitian Rumah Sakit Swasta di Pekanbaru. Makna dari pengaruh negatif dari variabel implementasi *good governance* tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi implementasi *good governance* maka akan semakin rendah tingkat kecenderungan kecurangan.





## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan. Faktor-faktor yang diajukan dalam penelitian ini yaitu efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi, dan implementasi *good governance*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pejabat Pengelola Keuangan (PPK), Kepala Sub Bagian Keuangan beserta staff Sub Bagian Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Blitar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal tidak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Sedangkan variabel asimetri informasi memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Artinya semakin tinggi asimetri informasi, maka semakin tinggi pula tingkat kecenderungan kecurangan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan variabel implementasi *good governance* memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Artinya semakin tinggi implementasi *good governance*, semakin rendah tingkat kecenderungan kecurangan.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

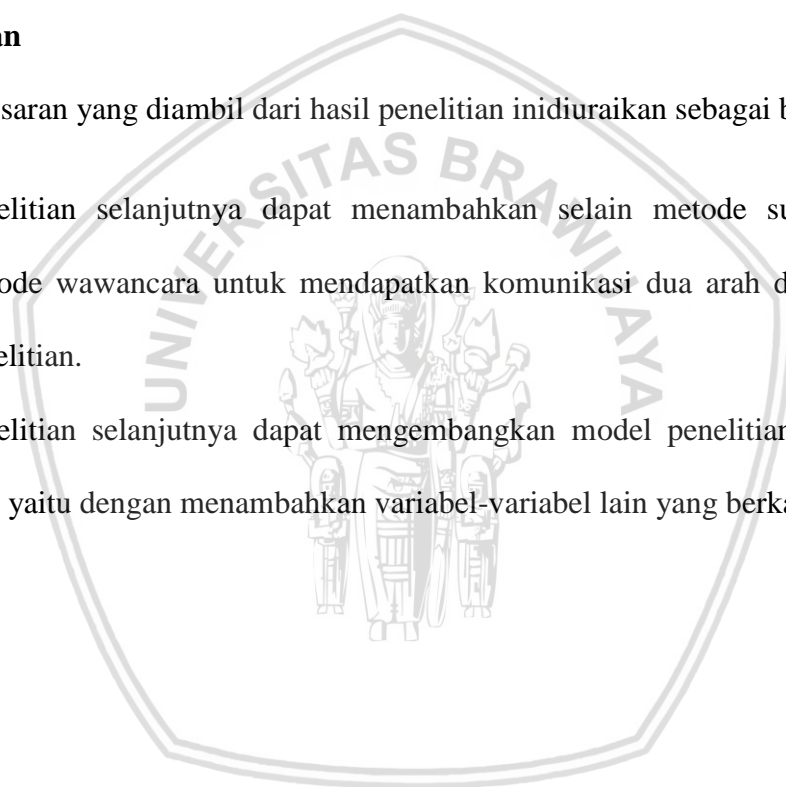
Adapun keterbatasan pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Batas waktu pengembalian waktu kuesioner pada masing-masing OPD berbeda-beda karena tidak terteranya batas pengisian kuesioner. Hal ini menghambat proses pengolahan kuesioner

## 5.3 Saran

Adapun saran yang diambil dari hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan selain metode survei seperti metode wawancara untuk mendapatkan komunikasi dua arah dengan objek penelitian.
2. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model penelitian yang lebih luas yaitu dengan menambahkan variabel-variabel lain yang berkaitan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Willy dan Jogiyanto. 2015. *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Ed.1. Yogyakarta: ANDI
- ACFE (Association of Certified Fraud Examiner). 2014. *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abused*.
- Adelin, Vani, 2013. *Pengaruh pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi*. Skripsi: Universitas Negeri Padang.
- Artini, Eka Ari. 2014. *Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Bestari, D.S (2016). Pengaruh keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening. 1(3). 9-10.
- Boynton, W. C., R. N. Jonson, dan W. G. Kell (2002). *Modern Auditing*. Jakarta: Erlangga.
- Dewi, K.Y & Ratnadi, N.M (2017). Pengaruh pengendalian internal dan integritas pada kecenderungan kecurangan akuntansi satuan kerja perangkat daerah kota denpasar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. (18).2, 917-942.
- FCGI. 2006. *Definition Of Good Corporate Governance*, tersedia di: <http://www.fcgi.or.id>, (diakses pada tanggal 13 Maret 2018).
- Gembong, Machfoed. 2017. Kasus Korupsi Dana Atlet, Kejaksaan Tahan Bendahara KONI Blitar. <https://nasional.tempo.co/read/859304/kasus-korupsi-dana-atlet-kejaksaan-tahan-bendahara-koni-blitar> diakses pada tanggal 21 Februari 2018.
- Ghozali, Imam. 2008. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hall, James. A. 2009. *Accounting Information System*. Jakarta: Salemba Empat

- Hanan, Abdul. 2017. Kasus Korupsi KONI, Polisi Periksa 11 Anggota DPRD Blitar. <http://www.jatimtimes.com/baca/146650/20160910/174832/kasus-korupsi-koni-polisi-periksa-11-anggota-dprd-blitar/diaksespada tanggal 21 Februari 2018>.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2012). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat, Jakarta
- Indonesian Corruption Watch. (2017). Annual Report 2017. Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun/laporan-akhir-tahun-icw-2017>
- Jogiyanto. (2016). *Metodologi penelitian bisnis*. Edisi 6. Yogyakarta : BPFE
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Meliany, L & Hermawati, E. (2013). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Interna dan Kesesuaian Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muna, B. N. (2016). *Pengaruh pengendalian internal dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi*. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Najahningrum, Anik. Fatun. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. Skripsi Akuntansi. Universitas Negeri Semarang.
- Pangestika, F. (2016). *Pengaruh pengendalian internal, good governance, dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai bidang keuangan pemerintah daerah kabupaten temanggung*. Jurusan Akuntansi. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Diakses dari <http://www.lhokseumawekota.co.id/aturan/PP-18-2016.pdf>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Diakses dari [http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008\\_SPI\\_P.pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Tahun2008_SPI_P.pdf)
- Prawira, I Made D., Nyoman T. Herawati, dan Nyoman A.S. Darmawan, (2014). Pengaruh moralitas individu, asimetri, informasi, dan efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 1-12

- Priantara, Diaz. (2013). *Fraud Auditing dan Investigation*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Pristiyanti, Ika Ruly. 2012. *Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Ramadhany, Indra. (2017). Pengaruh sistem pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi dan implementasi *good corporate Governance* terhadap kecenderungan Kecurangan akuntansi. JOM Fekon.4(1), 1253-1267
- Ratnayani, Ayu. (2014). Pengaruh Pengendalian Intern Kas dan Implementasi Good Governance terhadap Fraud (Studi Empiris di SKPD Kabupaten Buleleng. E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 4(2), 1-10
- Rosjidi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah (Kerangka, Standar dan Metode)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputra, G.K., Dharmawan N.A., Purnamawati, G.A. (2015). Pengaruh Pengendalian Intern Kas, Implementasi *Good Governance* dan Moralitas Individu terhadap Kecurangan (*Fraud*). E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 3(1), 1-10.
- Saputro, R. A. (2016). *Pengaruh komitmen organisasi, efektivitas pengendalian internal, keadilan organisasi, budaya etis organisasi, dan penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan*. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Scott, R. William. 2015. *Financial Accounting Theory. Seventh Edition*. Pearson Prentice Hall: Toronto.
- Sekaran, Uma & Bougie, Roger. (2013). *Research methods for business: A skill Building approach sixth edition*. Chichester: Wiley.
- Transparency International. (2017). *Corruption Perceptions Index 2017*. Diakses Dari [https://www.transparency.org/news/feature/corruption\\_perceptions\\_index\\_2017](https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017)

## LAMPIRAN

**Lampiran 1**

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Judul Penelitian dan Nama Peneliti</b>	<b>Variabel</b>	<b>Alat Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Meliany dkk., 2012)	1. Keefektifan Pengendalian Internal (X1) 2. Kesesuaian Kompensasi (X2) 3. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Y)	Regresi linier berganda	Keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
2.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan: Persepsi Pegawai Dinas Propinsi DIY (Najahningrum, 2013)	1. Penegakan peraturan (X1) 2. Sistem Pengendalian Internal (X2) 3. Asimetri Informasi (X3) 4. Keadilan Distributif (X4) 5. Keadilan Prosedural (X5) 6. Komitmen Organisasi (X6) 7. Budaya Etis Organisasi (X7) 8. Kecenderungan Kecurangan (Y)	Smart PLS 2.0 M3	Penegakan peraturan, sistem pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi, budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif.
3.	Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, dan Implementasi <i>Good Governance</i> terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Saftarini dkk, 2015)	1. Efektivitas pengendalian internal (X1) 2. Asimetri Informasi (X2) 3. Implementasi Good Governance (X3) 4. Kecenderungan kecurangan akuntansi (Y)	Regresi linier berganda	Efektivitas pengendalian internal dan implementasi good governance berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Asimetri Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan



4	Pengaruh Pengendalian Internal, <i>Good Governance</i> , Peranan Auditor Internal, dan Keadilan Organisasi terhadap Tingkat Kecurangan (Syarif, 2016)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian Internal (X1)</li> <li>2. <i>Good Governance</i>(X2)</li> <li>3. Peranan Auditor Internal (X3)</li> <li>4. Keadilan Organisasi (X4)</li> <li>5. Tingkat Kecurangan (Y)</li> </ol>	Regresi linier berganda	Pengendalian internal, Good Governance, Peranan Auditor, dan Keadilan Organisasi berpengaruh negatif terhadap tingkat kecurangan
5	Pengaruh Pengendalian Internal dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi ( <i>Fraud</i> ) (Muna, 2016)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian Interna (X1)</li> <li>2. Asimetri Informasi (X2)</li> <li>3. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Y)</li> </ol>	Regresi linier berganda	Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan asimetri informasi berpengaruh positif





## **Lampiran 2**

### Kuesioner Penelitian

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indhira Ayustina Pangestutie  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi  
Judul Penelitian : Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, dan Implementasi Good Governance terhadap Kecenderungan Kecurangan

Bersama ini, saya bermaksud melakukan penelitian melalui penyebaran kuesioner kepada objek penelitian ini yaitu OPD di Kabupaten Blitar. adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir Strata Satu (S1) sebagai prasyarat kelulusan pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

Besar harapan saya untuk menerima jawaban berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Saya menjamin kerahasiaan semua data yang telah terkumpul dan data tersebut hanya akan saya gunakan dalam penelitian ini. Atas bantuan dan kerja sama dari Bapak/Ibu pegawai OPD Kabupaten Blitar saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada pernyataan yang kurang berkenan.

Hormat Saya

Indhira Ayustina P

## KUESIONER PENELITIAN

### I. IDENTITAS RESPONDEN

Mohon untuk mengisi identitas responden dengan memberi tanda silang (X) atau lingkaran (O) pada jawaban yang tersedia di bawah ini :

1. Nama Bapak/Ibu :
2. Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita
3. Usia : ..... tahun
4. Masa Kerja :  
☐ 1-5 tahun ☐ 6-10 tahun ☐ 11-15 tahun ☐ > 15 tahun
5. Pendidikan Terakhir :  
☐ SMA/ Sederajat ☐ Magister (S2)  
☐ Diploma ☐ Doktor (S3)  
☐ Sarjana (S1) ☐ Lainnya

### II. PETUNJUK PENGISIAN

Berilah jawaban pada pernyataan berikut sesuai dengan pendapat anda dengan cara memberi tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia.

Keterangan :

STS	TS	N	S	SS
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

**A. Efektivitas Pengendalian Internal**

No	Daftar pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Di instansi tempat saya bekerja, sudah ada pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas					
2	Di instansi tempat saya bekerja, telah ditetapkan peraturan untuk pemeriksaan fisik atas kekayaan instansi (kas, persediaan, dan lain-lain)					
3	Di instansi tempat saya bekerja, seluruh informasi kegiatan operasional instansi harus dicatat sesuai dalam sistem akuntansi					
4	Di instansi tempat saya bekerja, diterapkan peraturan untuk pemantauan dan evaluasi atas aktivitas operasional untuk mengawasi fungsi pengendalian internal (misal derajat keamanan kas, persediaan, dsb)					

**B. Asimetri Informasi**

No	Daftar pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Di instansi ini, hanya penanggung jawab penyusunan laporan keuangan yang mengerti lika-liku pembuatan laporan keuangan					
2	Hanya pihak internal instansi yang mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pembuatan laporan keuangan					
3	Hanya pihak internal instansi yang mengetahui isi dan angka yang sebenarnya dari laporan keuangan					

### C. Implementasi *Good Governance*

No	Daftar pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi telah dipublikasikan secara bebas dapat diakses oleh masyarakat luas					
2	Informasi yang tersedia dapat dimengerti dan merupakan perwujudan nyata dari transparansi pemerintah					
3	Pertanggungjawaban instansi ini dilakukan secara periodik melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)					
4	Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas setiap aktivitas akan membangun <i>good governance</i>					
5	Untuk menciptakan <i>good governance</i> , pengelolaan sumber daya publik harus dilakukan secara efektif					
6	Keuangan dari instansi ini dikelola secara efektif					

**D. Kecenderungan Kecurangan**

No	Daftar pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Suatu hal yang wajar di instansi saya, apabila untuk suatu tujuan tertentu, biaya dicatat lebih besar dari semestinya					
2	Merupakan hal yang wajar di instansi saya, apabila pengguna anggaran memasukkan kebutuhan lain yang tidak sesuai ke dalam belanja peralatan gedung dan kantor					
3	suatu hal yang wajar apabila di instansi saya, ditemukan adanya pengeluaran tanpa dokumen pendukung					
4	Bukan suatu masalah bagi instansi saya, apabila sisa anggaran dibagikan kepada pegawai sebagai bonus					
5	Bukan suatu masalah bagi instansi saya, apabila pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang					
6	Suatu hal yang wajar bagi instansi saya, apabila untuk tujuan tertentu harga beli peralatan/perlengkapan kantor dicatat lebih tinggi					
7	Suatu hal yang wajar apabila di instansi saya, para pengguna anggaran menggunakan kuitansi kosong atas pembelian bahan perlengkapan kantor					

### Lampiran 3

#### Jawaban Responden

EPI 1	EPI 2	EPI 3	EPI 4	AI 1	AI 2	AI 3	IGG 1	IGG 2	IGG 3	IGG 4	IGG 5	IGG 6	KK 1	KK 2	KK 3	KK 4	KK 5	KK 6	KK 7
5	4	4	4	1	1	1	3	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1
5	4	4	4	1	2	1	3	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1
5	4	3	4	1	1	2	3	4	4	4	4	4	2	1	1	2	2	1	1
4	4	3	4	1	1	1	3	3	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	1	1	1	4	4	4	5	5	4	1	1	1	1	1	1	1
5	4	4	4	1	1	1	4	4	4	4	4	4	1	1	2	2	2	2	1
5	5	5	5	1	1	1	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	4	1	1	1	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	5	1	1	1	4	4	4	4	4	4	2	2	2	1	2	1	1
5	5	5	5	1	1	1	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
5	4	5	4	1	2	2	3	5	5	5	4	4	2	2	2	2	2	2	2
4	4	3	3	2	1	2	4	4	3	5	5	4	2	3	2	1	1	1	2
4	4	4	4	2	2	2	3	5	4	4	4	4	2	2	2	2	1	1	1
4	4	4	4	1	1	1	4	4	4	4	4	4	2	1	1	1	2	2	2
4	3	4	3	1	2	2	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2
4	4	3	4	2	2	2	3	5	5	5	5	4	1	1	1	1	1	1	1
5	4	4	4	2	2	2	3	4	4	4	4	4	1	1	1	1	2	2	1
5	4	4	4	1	1	1	3	4	4	4	4	4	1	1	1	2	1	1	1
5	5	5	5	1	1	1	5	5	5	5	5	4	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	4	1	1	1	4	4	4	4	4	5	2	1	1	1	1	1	1
5	5	5	5	1	2	1	5	5	5	5	4	4	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	5	1	1	1	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	4	2	2	1	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	5	2	2	3	4	4	4	4	4	4	2	2	2	1	2	2	1
5	5	5	5	1	2	1	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
4	4	5	4	2	2	2	4	4	5	5	4	4	2	2	2	2	2	2	2
5	4	4	4	2	3	3	3	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1
5	4	4	4	2	1	1	3	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	5	1	1	1	5	5	5	5	5	4	1	1	1	1	1	1	1
5	4	4	4	1	3	1	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
5	4	4	4	1	1	1	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
5	4	4	4	2	1	1	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	1	1	2	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
5	4	4	4	1	1	1	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	5	1	1	1	5	5	5	5	4	5	1	1	1	1	1	1	1
5	4	4	5	1	1	1	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1

EPI 1	EPI 2	EPI 3	EPI 4	AI 1	AI 2	AI 3	IGG 1	IGG 2	IGG 3	IGG 4	IGG 5	IGG 6	KK 1	KK 2	KK 3	KK 4	KK 5	KK 6	KK 7
4	4	4	4	1	1	1	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	5	1	1	1	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
4	4	5	4	1	1	1	5	5	5	4	5	5	1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	2	2	2	4	4	4	5	4	4	2	2	2	2	2	2	2
5	4	3	4	2	2	3	3	4	4	5	4	4	2	1	1	1	1	1	1
4	4	3	4	2	2	3	3	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	1	1	2	4	4	4	4	5	4	1	1	1	1	1	1	1
5	4	4	4	2	2	3	4	4	4	4	4	4	2	1	2	2	2	2	2
5	5	5	5	1	1	1	5	5	5	4	5	5	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	4	1	1	1	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	5	1	1	1	4	4	4	4	4	4	2	2	2	1	2	1	1
5	5	5	5	1	1	1	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
5	4	5	4	2	2	2	4	4	5	5	4	4	2	2	2	2	2	2	2
4	4	3	3	2	2	1	4	4	4	5	5	4	1	1	2	2	3	2	2
4	4	4	4	1	1	2	3	4	4	4	4	4	2	1	2	2	1	1	1
4	4	4	4	1	1	1	4	4	4	4	4	4	2	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	2	2	3	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2
5	5	5	5	1	1	1	5	5	5	4	5	5	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	4	2	1	1	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	5	1	1	1	4	4	4	4	4	4	2	2	2	1	2	1	1
5	5	5	5	1	1	1	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
5	4	5	4	2	2	2	4	5	5	5	4	4	2	2	2	1	1	1	2
5	3	4	4	2	2	2	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	1	1
5	4	4	4	1	1	1	3	4	4	4	4	4	1	1	1	1	2	1	1
5	4	4	4	2	3	3	3	4	4	4	4	4	1	1	1	2	2	1	1
5	4	3	4	1	1	2	3	4	4	3	4	4	2	1	1	1	1	1	1
4	4	3	4	2	1	3	3	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	1	1
4	4	4	4	2	1	2	4	4	4	5	5	4	1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	2	2	3	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	1	1
5	5	5	5	1	3	1	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	4	2	2	1	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	5	1	1	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	1	2	1	1
5	5	5	5	1	1	1	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
4	4	5	4	2	2	2	4	5	5	5	4	4	2	2	2	2	2	2	2
4	4	3	3	2	2	2	4	4	4	5	5	4	1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	1	1	1	5	4	4	4	4	4	2	1	2	2	1	1	1
4	4	4	4	2	2	2	5	4	4	4	4	4	2	1	1	1	1	1	1
4	3	4	3	2	2	2	4	4	4	4	4	4	2	2	2	1	2	1	1
4	4	3	4	1	1	1	3	5	5	5	5	4	1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	1	1	1	3	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1





## **Lampiran 4**

### **Hasil Pilot Test**

#### **1. Tabel Algoritma (Pilot Test)**

Variabel	AVE	Composite Reliability	Cronbachs Alpha	Communality
EPI	0,7004	0,9028	0,8614	0,7004
AI	0,7401	0,8949	0,8253	0,7401
IGG	0,7333	0,9316	0,9266	0,7333
KK	0,6254	0,9207	0,8999	0,6254

Sumber: Data Primer Diolah (2018)

#### **2. Tabel Outer Loading (Pilot Test)**

	AI	EPI	IGG	KK
AI 1	0,9104			
AI 2	0,7959			
AI 3	0,8706			
EPI 1		0,7249		
EPI 2		0,9177		
EPI 3		0,8198		
EPI 4		0,873		
IGG 1			0,7697	
IGG 2			0,9114	
IGG 3			0,8907	
IGG 4			0,7382	
IGG 5			0,8758	
IGG 6			0,9334	
KK 1				0,7271
KK 2				0,7907
KK 3				0,9245
KK 4				0,8141
KK 5				0,8061
KK 6				0,7267
KK 7				0,7268

Sumber: Data primer diolah (2018)

### 3. Tabel Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten (Pilot test)

Variabel	Akar AVE	AI	EPI	IGG	KK	AVE
AI	<b>0,860291</b>	1	0	0	0	0,7401
EPI	<b>0,836899</b>	-0,5017	1	0	0	0,7004
IGG	<b>0,856329</b>	-0,4724	0,6674	1	0	0,7333
KK	<b>0,790569</b>	0,5879	-0,3838	-0,6107	1	0,625

Sumber: Data primer diolah (2018)

### 4. Tabel Cross Loading (Pilot tes)

Variabel	AI	EPI	IGG	KK
AI 1	<b>0,9104</b>	-0,4803	-0,3306	0,5421
AI 2	<b>0,7959</b>	-0,2472	-0,1668	0,3966
AI 3	<b>0,8706</b>	-0,5225	-0,639	0,5554
EPI 1	-0,1543	<b>0,7249</b>	0,4258	-0,1932
EPI 2	-0,5151	<b>0,9177</b>	0,6705	-0,4587
EPI 3	-0,4163	<b>0,8198</b>	0,661	-0,255
EPI 4	-0,4897	<b>0,873</b>	0,4182	-0,273
IGG 1	-0,3295	0,5833	<b>0,7697</b>	-0,3264
IGG 2	-0,4479	0,6611	<b>0,9114</b>	-0,5545
IGG 3	-0,3908	0,6592	<b>0,8907</b>	-0,4422
IGG 4	-0,1106	0,4012	<b>0,7382</b>	-0,3329
IGG 5	-0,4641	0,4245	<b>0,8758</b>	-0,6769
IGG 6	-0,5041	0,7147	<b>0,9334</b>	-0,622
KK 1	0,4296	-0,3661	-0,6571	<b>0,7271</b>
KK 2	0,4331	-0,1757	-0,464	<b>0,7907</b>
KK 3	0,4116	-0,3137	-0,5473	<b>0,9245</b>
KK 4	0,5684	-0,4159	-0,525	<b>0,8141</b>
KK 5	0,4659	-0,3241	-0,5293	<b>0,8061</b>
KK 6	0,46	-0,2509	-0,2666	<b>0,7267</b>
KK 7	0,4924	-0,2237	-0,2235	<b>0,7268</b>

Sumber: Data primer diolah (2018)

**Lampiran 5****Hasil Output Data PLS****1. Validitas Konvergen****Nilai AVE dan Communality**

<b>Variabel</b>	<b>AVE</b>	<b>Communality</b>
EP	0,6781	0,6781
AI	0,6767	0,6767
IGG	0,7235	0,7235
KK	0,6480	0,6480

**Sumber: Data Primer Diolah, 2018**

**Nilai Factor Loading**

<b>Variabel ke Indikator</b>	<b>Factor Loading</b>	<b>t-statistic</b>
EPI1 <- EPI	0,7484	13,0533
EPI2 <- EPI	0,9045	24,7394
EPI3 <- EPI	0,7779	8,0181
EPI4 <- EPI	0,8538	15,4658
AI1 <- AI	0,8510	15,3176
AI2 <- AI	0,7354	7,2962
AI3 <- AI	0,8747	25,0253
IGG1 <- IGG	0,8270	21,7656
IGG2 <- IGG	0,9032	30,2105
IGG3 <- IGG	0,8560	20,7318
IGG4 <- IGG	0,7368	11,9520
IGG5 <- IGG	0,8726	27,8720
IGG6 <- IGG	0,8969	33,2976
KK1 <- KK	0,7985	17,9924
KK2 <- KK	0,8056	18,3442
KK3 <- KK	0,9168	52,7213
KK4 <- KK	0,7746	15,6394
KK5 <- KK	0,8262	24,0207
KK6 <- KK	0,7414	11,8834
KK7 <- KK	0,7594	12,3058

**Sumber: Data Primer Diolah(2018)**

## 2. Validitas Diskriminan

**Nilai Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten**

Indikator	Akar AVE	EPI	AI	IGG	KK	AVE
<b>EPI</b>	0,82347	<b>1</b>	0	0	0	0,6781
<b>AI</b>	0,82261	-0,3624	<b>1</b>	0	0	0,6767
<b>IGG</b>	0,85058	0,4772	-0,4164	<b>1</b>	0	0,7235
<b>KK</b>	0,80498	-0,3662	0,5082	-0,6011	<b>1</b>	0,6480

Sumber: Data Primer Diolah (2018)

**Nilai Cross Loading**

Indikator	AI	EPI	IGG	KK
AI 1	0,8510	-0,3737	-0,2774	0,3966
AI 2	0,7354	-0,1752	-0,1413	0,2864
AI 3	0,8747	-0,3176	-0,5137	0,52
EPI 1	-0,1732	0,7484	0,2621	-0,2899
EPI 2	-0,3519	0,9045	0,4707	-0,3712
EPI 3	-0,2621	0,7779	0,5	-0,1517
EPI 4	-0,3808	0,8538	0,3868	-0,315
IGG 1	-0,3889	0,4694	0,8270	-0,3889
IGG 2	-0,329	0,4632	0,9032	-0,5229
IGG 3	-0,3388	0,4854	0,8560	-0,4269
IGG 4	-0,1334	0,2029	0,7368	-0,2866
IGG 5	-0,3888	0,3028	0,8726	-0,6529
IGG 6	-0,4504	0,4893	0,8969	-0,6212
KK 1	0,4321	-0,2967	-0,6137	0,7985
KK 2	0,4439	-0,2219	-0,4405	0,8056
KK 3	0,4376	-0,2764	-0,5251	0,9168
KK 4	0,4101	-0,4183	-0,4972	0,7746
KK 5	0,4122	-0,2426	-0,5551	0,8262
KK 6	0,3525	-0,2647	-0,3603	0,7414
KK 7	0,3529	-0,3633	-0,2926	0,7594

Sumber : Data Primer Diolah (2018)

### 3. Uji Reliabilitas

#### Nilai Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
EPI	0,8443	0,8934
AI	0,7682	0,8620
IGG	0,9243	0,9399
KK	0,9094	0,9277

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

### 4. Nilai R<sup>2</sup>

#### Nilai R-square

Variabel	R <sup>2</sup>
EPI	
AI	
IGG	
KK	0,4429

Sumber: Data primer diolah, 2018

### 5. Nilai Path Coefficient

#### Nilai Path Coefficient

Hipotesis	Variabel	Original Sampel	t-Statistic	Keputusan
H1	EPI -> KK	-0,0381	0,4694	Ditolak
H2	AI -> KK	0,3044	3,0497	Diterima
H3	IGG-> P	-0,4562	5,2990	Diterima